

**POLITIK MITIGASI PASCA BENCANA BANJIR TINGKAT
DESA PADA DESA PUOREJO DAN DESA TEGALREJO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :

MOHAMAD PANJI SAPUTRO

NIM. I91219088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JULI 2023**

PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mohamad Panji Saputro

NIM : I91219088

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Politik Mitigasi Pasca Bencana Banjir Tingkat
Desa pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo
Kabupaten Lumajang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan



Mohamad Panji Saputro
NIM : I91219088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Mohamad Panji Saputro

NIM : I91219088

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Politik Mitigasi Pasca Bencana Banjir Tingkat
Desa pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo
Kabupaten Lumajang

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 19 Juni 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP : 196909071994032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Mohamad Panji Saputro dengan judul POLITIK MITIGASI PASCA BENCANA BANJIR TINGKAT DESA PADA DESA PUROREJO DAN DESA TEGALREJO KABUPATEN LUMAJANG telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 03 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP. 197202062007101003

Penguji III



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.si
NIP. 197607182008012022

Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A
NIP. 199502232020122025

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Panji Saputro
NIM : 191219088
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
E-mail address : mpanjisapt@gmail.com

Demı pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

POLITIK MITIGASI PASCA BENCANA BANJIR TINGKAT DESA

PADA DESA PUROREJO DAN DESA TEGALREJO KABUPATEN LUMAJANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Agustus 2023

Penulis

(Mohamad Panji Saputro)

ABSTRAKSI

Mohamad Panji Saputro, 2023, *Politik Mitigasi Pasca Bencana Banjir Tingkat Desa Pada Desa Purorejo Dan Desa Tegalrejo Kabupaten Lumajang*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Politik Mitigasi, Bencana Banjir, Desa Purorejo, Desa Tegalrejo

Masalah yang diteliti adalah bagaimana politik mitigasi bencana banjir di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo, meliputi (1) bagaimana tindakan pemerintah desa dalam mitigasi bencana banjir, (2) bagaimana keterlibatan agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami politik mitigasi bencana banjir di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo, meliputi (1) mengetahui bagaimana tindakan Pemerintah Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo dalam mitigasi bencana banjir, (2) mengetahui bagaimana keterlibatan agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih yaitu perangkat desa dan masyarakat desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah agen dan struktur dalam Teori Strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tindakan dan keterlibatan pada proses mitigasi bencana banjir menunjukkan keseriusan terhadap pengantisipasi bencana banjir yang terjadi di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo. Tindakan pemerintah desa dengan melakukan mitigasi bencana banjir menjadi bentuk komitmen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir dan dengan keterlibatan banyak pihak membawa dampak positif terhadap percepatan proses mitigasi bencana banjir yang sedang berlangsung. Dalam proses mitigasi bencana banjir terjadi dualitas struktur atau hubungan yang saling mempengaruhi diantara agensi dan struktur. Struktur (pemerintah) pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo memengaruhi agensi (masyarakat) pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo dengan memampukan dalam bentuk beragam tindakan dan keterlibatan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir. Sedangkan, agensi pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo mempengaruhi struktur pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo dengan keterlibatan proaktifnya dalam proses mitigasi bencana banjir.

ABSTRACT

Mohamad Panji Saputro, 2023, Post-Flood Mitigation Politics at the Village Level in Purorejo Village and Tegalrejo Village, Lumajang Regency, Thesis of the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords : Mitigation Politics, Flood Disaster, Purorejo Village, Tegalrejo Village

The problem studied is how the politics of flood disaster mitigation in Purorejo Village and Tegalrejo Village, including (1) how the village government acts in flood disaster mitigation, (2) how the involvement of agencies and structures in the flood disaster mitigation process.

The purpose of this study is to know and understand the politics of flood disaster mitigation in Purorejo Village and Tegalrejo Village, including (1) knowing how the actions of the Purorejo Village Government and Tegalrejo Village in mitigating flood disasters, (2) knowing how the involvement of agencies and structures in the flood disaster mitigation process.

The research uses a qualitative descriptive approach with a type of case study. Data collection techniques are performed using observations, interviews and documentation. The chosen informants are representatives of villages and village communities. The theory applied in this study is the agent and the structure in the structuring theory initiated by Anthony Giddens.

The results of this study show that the existence of actions and involvement in the flood disaster mitigation process shows the seriousness of anticipating flood disasters that occurred in Purorejo Village and Tegalrejo Village. The actions of the village government by mitigating flood disasters has a form of commitment in solving various problems or impacts caused by flood disasters and with the involvement of many parties had a positive impact on accelerating the ongoing flood disaster mitigation process. In the flood disaster mitigation process, there is a dual structure or relationship that affects other organisms and structures. The (government) structure in Purorejo Village and Tegalrejo Village influences the agency (community) in Purorejo Village and Tegalrejo Village by enabling various actions and structural involvement in the flood disaster mitigation process. At the same time, agencies in the village of Purorejo and the village of Tegalrejo influence the structure of the village of Purorejo and the village of Tegalrejo by being proactive participants in the flood mitigation process.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual	10
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	18
1. Politik Mitigasi Banjir	18
2. Agen dan Struktur dalam Teori Strukturasi	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Pemilihan Informan dan Objek Penelitian	28
1. Subjek Penelitian.....	28
2. Teknik Penentuan Informan	29
3. Objek Penelitian	30
D. Tahap – Tahap Penelitian	30
1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang akan Diteliti.....	30
2. Penentuan Metodologi Penelitian	32
3. Pengumpulan Data	32
4. Pengolahan, Analisis dan Intrepretasi Data	33
5. Penyusunan Laporan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35
2. Interview / Wawancara	35
3. Dokumentasi	36
F. Teknik Analisis Data	37

1. Data Reduksi	37
2. Penyajian Data	38
3. Penarikan Simpulan.....	39
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	40
1. Meningkatkan Ketekunan	40
2. Triangulasi	40
3. Sistematika Pembahasan	42
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN	43
A. Gambaran Umum Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo	43
1. Fenomena Banjir di Desa Purorejo dan Tegalrejo	43
2. Kondisi Geografi Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo	51
3. Kondisi Demografi Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo	54
4. Potensi Sumber Daya Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo	55
5. Mata Pencapaian Masyarakat Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo.....	62
B. Tindakan dan Keterlibatan dalam Mitigasi Bencana Banjir	65
1. Tindakan Pemerintah Desa Purorejo dalam Mitigasi Bencana Banjir.....	65
2. Tindakan Pemerintah Desa Tegalrejo dalam Mitigasi Bencana Banjir.....	74
3. Prioritas dan Hambatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir	82
4. Keterlibatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir	83
C. Agensi dan Struktur dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir	94
1. Dinamika Struktur dan Agensi dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Purorejo.....	95
2. Dinamika Struktur dan Agensi dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Tegalrejo	108
3. Komparasi	113
BAB V PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	
1. Surat Izin Penelitian	
2. Pedoman Wawancara	
3. Jadwal Penelitian	
4. Dokumentasi Penelitian	

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Daftar Nama Informan Desa Purorejo	29
Gambar 3.2 Daftar Nama Informan Desa Tegalorejo.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Banjir pada Pemukiman Penduduk.....	46
Gambar 4.2 Banjir pada Pertanian dan Perkebunan	47
Gambar 4.3 Akses jalan	47
Gambar 4.4 Banjir pada Pertanian dan Perkebunan	50
Gambar 4.5 Akses Jalan Nelayan Andon	51
Gambar 4.6 Kantor Desa Purorejo.....	52
Gambar 4.7 Kantor Desa Tegalorejo.....	53
Gambar 4.8 Coban Pabrik.....	57
Gambar 4.9 Sungai Gelidik	58
Gambar 4.10 Umbul Tourism Park	59
Gambar 4.11 Pertanian dan Perkebunan.....	59
Gambar 4.12 Pantai Bulu.....	61
Gambar 4.13 Pertanian dan Perkebunan.....	62
Gambar 4.14 Pengkoordinasian.....	67
Gambar 4.15 Penyisiran dan Pemantauan.....	68
Gambar 4.16 Evakuasi.....	70
Gambar 4.17 Pembersihan Ases Jalan.....	71
Gambar 4.18 Pemberian Bantuan	72
Gambar 4.19 Pemasangan Bronjong	74
Gambar 4.20 Sosialisasi dan Simulasi Bencana	77
Gambar 4.21 Pemantauan Debit Air Sungai Gelidik.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik mitigasi dalam studi ilmu politik masih sedikit diperbincangkan. Terkait dengan fenomena bencana alam yang saat ini lebih sering terjadi karena pemanasan global, maka politik mitigasi kemudian menjadi arena studi yang menarik dari ilmu politik.

Desa yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Kedua desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat fenomena menarik di dalamnya yaitu faktor penyebab bencana banjirnya sama, tetapi dampak yang di timbulkan berbeda diantara keduanya. Fenomena bencana banjir ini terjadi tepat pada 17 Oktober 2022.

Faktor penyebab terjadinya bencana banjir pada Desa Purorejo tersebut dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dan bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru.¹ Tidak berbeda dengan Desa Purorejo, faktor penyebab terjadinya bencana banjir pada Desa Tegalrejo dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dan bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru.² Sungai Gelidik menjadi aliran sungai yang berhulu sampai pada Gunung Semeru. Ketika erupsi terjadi maka Sungai

¹Nanang Wahyudi, wawancara bersama penulis, 14 Maret 2023.

²Nyono, wawancara bersama penulis, 13 Maret 2023.

Gelidik menjadi aliran sungai yang dilalui oleh muntahan lahar dingin Gunung Semeru.

Bencana banjir di Desa Purorejo menerjang pemukiman penduduk desa dengan ketinggian banjir berkisar 20 – 50 cm. Dampak yang ditimbulkan oleh fenomena banjir ini sangat beragam mulai dari trauma yang dirasakan masyarakat desa, terendahnya pemukiman penduduk, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta tertutupnya akses jalan desa. Dapat dikatakan bahwa bencana banjir pada Desa Purorejo menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat desa. Sebanyak 102 rumah penduduk terendam banjir dan masyarakat desa memilih untuk mengungsi di tempat yang lebih aman sampai situasi dan kondisi kembali normal. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 315 jiwa dari 110 kepala keluarga yang mengungsi.³

Berbeda dengan Desa Purorejo, pada Desa Tegalrejo luapan air Sungai Gelidik menerjang lahan pertanian dan perkebunan masyarakat desa. Dampak yang ditimbulkan oleh fenomena bencana banjir ini adalah rusaknya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat desa.⁴ Di luar petani dan pekebun yang dirugikan, para nelayan juga merasakan dampak dari adanya fenomena bencana banjir ini. Nelayan tidak bisa berlayar mencari ikan saat debit air Sungai Gelidik meningkat terlebih jembatan yang

³Miftahul Huda, "Banjir Landa Desa Purorejo Lumajang, 102 Rumah Terendam dan 315 Warga Mengungsi", <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/17/232909678/banjir-landa-desa-purorejo-lumajang-102-rumah-terendam-dan-315-warga>, diakses 6 Januari 2023 pukul 22.00 WIB.

⁴Imam Muzani, panggilan suara Whatsapp kepada penulis, 09 November 2022.

menjadi akses para nelayan hanya terbuat dari bambu, maka saat debit air meningkat atau saat banjir datang maka para nelayan harus mengurungkan niatnya untuk pergi mencari ikan.

Bencana banjir menjadi fenomena menarik dalam penelitian karena dampak yang ditimbulkan beragam dan tidak dapat diprediksi tepat kapan dan dimana akan terjadi. Bencana banjir membawa beragam kerugian harta benda, ekonomi, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Kerugian harta benda terjadi apabila banjir merendam wilayah pemukiman penduduk, kerugian ekonomi terjadi apabila banjir merendam sektor yang menjadi mata pencaharian penduduk, kerusakan lingkungan terjadi apabila banjir mengalir sangat deras sehingga menerjang apa saja yang dilaluinya, korban jiwa terjadi apabila banjir mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Intensitas curah hujan dapat diprediksi pada suatu wilayah, tetapi bencana banjir tidak dapat diprediksi tepat kapan dan dimana akan terjadi, hal ini dikarenakan banjir terjadi secara tiba-tiba dengan waktu yang relatif cepat. Melihat dampak yang terjadi, fenomena bencana banjir membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Studi mitigasi bencana banjir telah banyak dilakukan, namun tidak dengan studi politik mitigasi banjir. Penelitian yang membahas tentang mitigasi bencana banjir hanya fokus menggambarkan bagaimana fenomena bencana banjir dapat terjadi, resiko atau dampak yang

ditimbulkan karena bencana banjir, dan mitigasi yang dilakukan. Penelitian ini mengisi ruang kosong terhadap penelitian-penelitian tentang mitigasi bencana banjir dengan melihat dari aspek politiknya yaitu politik mitigasi banjir.

Politik mitigasi banjir memuat tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan bagaimana menggunakan kewenangannya dalam studi fenomena bencana banjir, memuat tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses terjadinya bencana banjir dan proses mitigasi bencana banjir. Hal ini dapat dilihat dari beberapa literatur yang membahas tentang politik mitigasi, seperti politik mitigasi iklim yang menyatakan bahwa industri bahan bakar fosil menjadi pihak yang memengaruhi perubahan iklim atau pemanasan global yang terjadi⁵, berikutnya adalah politik mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam keberhasilan proses mitigasi yang dilakukan meliputi Bupati, BPBD, Damkar, DLH, Manggala, Relawan Balakar, perangkat Desa, TNI, POLRI, dan masyarakat setempat⁶. Dari sini dapat digambarkan bahwa poin inti pada politik mitigasi adalah tindakan dan keterlibatan dalam proses mitigasi yang dilakukan.

⁵Daniel Nyberg, Christopher Wright, Vanessa Bowden, *Organising Responses to Climate Change The Politics of Mitigation, Adaptation and Suffering*, United Kingdom : Cambridge University Press 2023, hal.43

⁶Eko Prasetyo Karyono, *Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Vol. 17 No. 1 Januari 2019, hal.7

Politik mitigasi banjir menjadi pilihan peneliti karena dalam studi politik mitigasi selalu menunjukkan fenomena bencana yang menyertai. Terkait dengan fenomena bencana yang diteliti pada penelitian ini adalah fenomena bencana banjir maka peneliti memilih politik mitigasi banjir dalam menggambarkan fenomena bencana banjir yang terjadi.

Dalam mitigasi banjir terdapat fenomena politik di dalamnya, persoalan lingkungan tidak disebabkan oleh internal lingkungan tetapi disebabkan oleh pengaruh eksternal yaitu tekanan politik. Pengelolaan lingkungan memiliki implikasi politik dimana aktor pemerintah memiliki kuasa untuk menentukan pola dan arah pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Persoalan hubungan manusia dengan lingkungan bukan persoalan kepadatan penduduk tetapi persoalan tekanan kekuasaan.⁷

Fenomena bencana seperti banjir dapat dilihat dengan fenomena politik, diberlakukan sistem desentralisasi menjadikan aktor pada lingkup pemerintah daerah memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada daerah tersebut. Fenomena seperti ini mengakibatkan aktor di daerah memiliki kontrol atas sumber daya alam yang memunculkan peluang adanya tindakan penyelewengan. Berimbas pada bencana ketika

⁷Samahuddin Muharram, Fadly, Dhena Aldhaliaa, Rosa Pebriandini, Falehah Nabila, Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 7 April 2022, hal. 150

pengelolaan lingkungan tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan itu sendiri.⁸

Pemberian fasilitas pemerintah kepada investor baik domestik ataupun asing dengan kebijakan berupa peluang dan jaminan hukum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”. Pemberian fasilitas kepada investor meningkatkan fenomena deforestasi. Deforestasi merupakan tindakan penebangan hutan ataupun mengubah fungsi dari penggunaan lahan hutan. Penebangan hutan berdampak pada hilangnya atau berkurangnya resapan air. Tanah longsor dan banjir menjadi fakta bencana yang terjadi akibat deforestasi.⁹

Pengabaian hubungan manusia dengan alam yang dilakukan secara sistematis melalui kebijakan pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan mengakibatkan banyak fenomena deterolisasi atau alih fungsi terutama alih fungsi lahan basah. Meningkatnya kebutuhan lahan yang digunakan pada sektor pembangunan terutama kepentingan industri mengakibatkan banyaknya lahan basah yang di alih fungsikan. Perubahan penggunaan lahan di latar belakang oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas

⁸Ibid., hal. 155

⁹Andi Tenri Somp, Arif Rahman Hakim, Dinar Adistiyani, Deforestasi di Kabupaten Banjar dalam Perspektif Politik Lingkungan, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 2 April 2022, hal. 203

pembangunan, dan aktivitas perekonomian. Sepertihalnya banyak aktivitas industri, perdagangan jasa, dan rumah hunian. Berkurangnya lahan basah sebagai pengendali banjir berdampak pada bencana banjir.¹⁰

Terkait dengan fenomena bencana banjir yang terjadi pada wilayah desa tentunya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah yang berada di tingkat desa. Pemerintah desa didefinisikan sebagai kesatuan organisasi pemerintahan di bawah kecamatan dan berada di daerah kabupaten yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.¹¹ Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh kepentingan masyarakat desa. Keseriusan pemerintah desa dapat dilihat dari pengimplementasian tindakan secara cepat dan tepat terhadap fenomena bencana banjir. Dalam pelaksanaannya, tindakan membutuhkan kontribusi banyak pihak untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan bencana banjir.

Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam merespon fenomena bencana banjir adalah dengan melakukan mitigasi bencana banjir. Mitigasi diambil dari bahasa Inggris *mitigation* yang diartikan dengan tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atas rasa sakit dari sesuatu. Mitigasi merupakan serangkaian kegiatan atau upaya yang memiliki tujuan yaitu mengenali resiko, penyadaran resiko bencana, dan

¹⁰Abdurrahman, dkk, Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Banjar: Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 1 April 2022, hal. 149

¹¹Syamsudin, Verliani Dasmawan, Triyulaeli, “Pengaruh Knowledge Management Bumdes Dan Leadership Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Pasca Bencana Tsunami”, Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 2021, hal. 260

perencanaan penanggulangan. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya mulai dari pencegahan sampai penanganan pasca terjadi sebuah bencana. Mitigasi bencana dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan mengurangi dampak dari sebuah bencana yang terjadi, baik struktural dengan pembuatan bangunan fisik dan non struktural dengan berpacu pada Undang-Undang ataupun penelitian yang pernah dilakukan. Tujuan dari mitigasi untuk mengurangi dampak buruk atas kerugian yang terjadi akibat bencana, baik secara ekonomis seperti kerusakan harta benda sampai dengan korban jiwa. Mitigasi dapat dilakukan untuk segala jenis bencana baik faktor alam ataupun faktor manusia. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan dengan rutin dan berkelanjutan, dengan begini tujuan dari mitigasi untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi dengan adanya bencana menjadi sebuah kenyataan atau terealisasi dengan baik.¹²

Studi politik mitigasi mengisi ruang kosong terhadap penelitian-penelitian yang membahas tentang mitigasi bencana dengan aspek politiknya yaitu politik mitigasi, Politik mitigasi banjir menjadi pilihan karena dalam penelitian ini fenomena yang di ulas adalah fenomena bencana banjir. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan yaitu bagaimana politik mitigasi bencana banjir di Desa Purorejo dan Desa Tegalorejo, meliputi bagaimana tindakan pemerintah desa dalam mitigasi bencana banjir dan bagaimana keterlibatan agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir.

¹²Sularso H.S, dkk, Mitigasi Risiko Bencana Banjir dimanado, Jurnal Spasial Vol. 8. No. 2 2021, hal. 269

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah: Bagaimana politik mitigasi bencana banjir di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas, dielaborasi dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan pemerintah desa dalam mitigasi bencana banjir ?
2. Bagaimana keterlibatan agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik mitigasi bencana banjir di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana tindakan pemerintah Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo dalam mitigasi bencana banjir.
2. Mengetahui bagaimana keterlibatan agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

menjadi acuan kepada peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena bencana banjir dan politik mitigasi tingkat desa.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertimbangkan, memberikan saran, atau masukan kepada semua pihak khususnya pemerintah desa terkait bencana banjir dan politik mitigasi tingkat desa serta menjadi salah satu penerapan ilmu yang didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan strata satu.

3. Manfaat Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya pada program studi Ilmu Politik dan juga menjadi bahan bacaan bagi khalayak untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang politik mitigasi banjir.

E. Definisi Konseptual

Agar pembahasan konsep tidak melebar dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi konseptual yang berfungsi untuk memepertegas konsep dan pembatasan fokus penelitian. Definisi konseptual yang akan dijelaskan berdasarkan judul penelitian yaitu politik mitigasi, bencana banjir, Desa Purorejo, Desa Tegalrejo, Kabupaten Lumajang.

1. Politik Mitigasi

Studi tentang politik mitigasi menyertakan terkait suatu bencana yang terjadi, tindakan pemerintah yang berwenang, dan keterlibatan. Fenomena bencana banjir memerlukan tindakan mitigasi dalam upaya meminimalisir dampak yang terjadi. Politik mitigasi menjadi pembeda dalam menganalisis sebuah fenomena bencana. Politik mitigasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik mitigasi banjir.

2. Bencana Banjir

Bencana yang terjadi di suatu wilayah selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Seperti bencana banjir yang merendam Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Bencana banjir yang melanda dua desa terjadi tepat pada tanggal 17 Oktober 2022. Bencana banjir diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi dan ditambah oleh erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan debit air Sungai Gelidik meningkat. Pada Desa Purorejo tanggul mengalami kerusakan sehingga air Sungai Gelidik masuk kedalam area pemukiman penduduk.¹³ Berbeda dengan Desa Purorejo, Pada Desa Tegalrejo banjir menghantam lahan pertanian dan perkebunan di area luar tanggul.¹⁴

Bencana merupakan fenomena atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat

¹³Imam Muzani, wawancara bersama penulis, 14 Maret 2023.

¹⁴Imam Supii, wawancara bersama penulis, 13 Maret 2023.

terjadi karena faktor alam, non alam, dan manusia.¹⁵ Banjir merupakan peristiwa tergenangnya suatu daratan yang diakibatkan oleh luapan air sungai akibat intensitas curah hujan yang tinggi atau bisa juga diakibatkan karena kiriman banjir dari daerah lain yang berada di dataran tinggi. Penyebab terjadinya banjir dapat dikarenakan oleh faktor alam dan faktor manusia.¹⁶

3. Desa Purorejo

Desa Purorejo merupakan satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Kantor desa berada di Jalan Umar Nomor 68 Desa Purorejo.¹⁷ Jarak antara desa ini dengan Lumajang kota berkisar 60 km dengan luas wilayah sebesar 3,14 km². Penduduk yang menempati desa ini sebanyak 3.485 Jiwa. Desa Purorejo memiliki beragam potensi alam meliputi pertanian, perkebunan, dan sektor lainnya seperti sumber mata air umbulan atau dikenal dengan nama Umbulsari Tourism Park dan air terjun Coban Pabrik yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.¹⁸ Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan berkebun sebagian lainnya memilih berdagang.¹⁹

¹⁵Yarwin Yari, Hardin La Ramba, Fendy Yesayas, Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Kesiapsiagaan Bencana Banjir pada Mahasiswa Kesehatan di DKI Jakarta, Jurnal Kesehatan Holistic, Volume 5 Nomor 2 Juli 2021, hal. 53

¹⁶Nur Mas'Ula, I Putu Siartha, I Putu Ananda Citra, Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Vol. 7 No. 3 November 2019, hal. 105

¹⁷<http://purorejo-tempursari.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/41>, diakses 6 Januari 2023 pukul 21.53 WIB.

¹⁸Redaksi, <https://www.kompasiana.com/kkn67057/62e0086608a8b50586533da2/melalui-kkn-universitas-jember-di-desa-purorejo-destinasi-wisata-sumber-mata-air-umbulsari-desa-purorejo->

Desa Purorejo dulunya terkenal dengan sebutan Desa Mbuyeng, terkenal dengan nama mbuyeng karena banyaknya penduduk pendatang yang merasakan pusing secara tiba-tiba. Mbuyeng di ambil dari kata setempat yaitu puyeng atau pusing. Tahun 1972 nama desa ini berubah menjadi Purorejo, diambil dari kata PURE yang bermakna pintu, tempat, atau rumah suci yang dihormati dan REJO yang bermakna ramai atau yang mengalami perubahan dinamis. Purorejo memiliki makna tempat, rumah, pusat kemajuan yang tidak pernah mati.²⁰

4. Desa Tegalrejo

Dengan luas 5,83 km² dan jumlah penduduk 3.327 jiwa sebagian besar mata pencharian penduduk desa sebagai nelayan dan petani. Kantor desa berada di Jl. Jendral Sudirman No.146. Desa Tegalrejo juga termasuk salah satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Licin yang termasuk kedalam wilayah Dampit Malang. Dapat dikatakan bahwa desa ini menjadi desa terpencil dengan jarak 80 km dari pusat Kabupaten Lumajang. Dengan batas-batas wilayah meliputi bagian utara berbatasan dengan Desa Purorejo, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, bagian timur berbatasan

kec-tempursari-kab-lumajang-diharapkan-hidup-kembali?page=all#section1, diakses 6 Januari 2023 pukul 22.54 WIB.

¹⁹Nanang Wahyudi, wawancara bersama penulis, 14 Maret 2023.

²⁰<http://purorejo-tempursari.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/2>, diakses pada 6 Januari 2023 pukul 21.47 WIB.

dengan Desa Bulurejo, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Desa Tegalrejo memiliki potensi alam berupa pertanian, perkebunan, dan pantai dengan kata lain mayoritas mata pencharian masyarakat sebagai petani, pekebun, dan nelayan.

5. Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah atau daerah yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 21 kecamatan dan 205 desa. Luas wilayahnya sebesar 1.790,90 km² dengan jumlah penduduk 1.104.759 jiwa. Kabupaten Lumajang memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Kabupaten Jember, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap bencana karena menduduki peringkat 4 (empat) nasional dengan resiko kerawanan bencana multi ancaman. Dikatakan multi ancaman karena Kabupaten Lumajang memiliki beberapa resiko bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bencana meliputi banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan angin puting beliung.²¹

²¹Amanda Putri Amelia, dkk. Sosialisasi APE (Alat Peraga Edukatif) untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Sdn 05 Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 03 Month October 2022, hal. 21

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari atas beberapa sumber penelitan yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan refrensi atau rujukan yang nantinya akan dikembangkan. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ananda Urbanus, Rieneke Lusiana Evani Sela, Aristotulus E. Tungka pada Jurnal Spasial Vol.8, No.3, 2021 dengan judul “Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non Struktural di Kabupaten Bolang Mongondow Selatan”. Penelitian ini memaparkan tentang indeks dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebuah bencana sehingga diketahui tingkat resiko bencana banjir dengan metode penelitian spasial dan deskriptif kualitatif. 3 (tiga) desa diketahui memiliki tingkat resiko bencana banjir tinggi, 14 (empat belas) desa dengan tingkat resiko bencana banjir sedang, dan 42 (empat puluh dua) desa dengan tingkat resiko bencana banjir rendah. ketiga kriteria ini di rekomendasikan melakukan mitigasi struktural dengan pembangunan secara fisik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rezki Pratama, Iswandi U pada Jurnal Buana Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial – Unp Vol.4, No.6, 2020 dengan judul “Mitigasi Bencana Banjir di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana mitigasi serta peran pemerintah dalam

menanggulangi resiko bencana banjir dan bagaimana mitigasi serta peran masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemerintah bertindak untuk mengetahui kekurangan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya, dalam prosesnya pemerintah mengajak kerjasama Damkar, TNI, dan POLRI untuk mengambil bagian dalam mitigasi bencana banjir. Masyarakat mengambil bagian dalam proses mitigasi bencana banjir dengan ikutserta melakukan evakuasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bima Ade Prayoga Setiawan, Eka Yulyana, Lina Aryani pada Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.7, No.8, Desember 2021. dengan judul “Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara”. Penelitian memaparkan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan BBWS (Badan Besar Wilayah Sungai) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus menghasilkan perencanaan relokasi pemukiman warga dan pelebaran sungai.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Carla S. Prater and Michael K. Lindell, dalam jurnal Natural Hazards Review / May 2000, dengan judul “Politics of Hazard Mitigation”. Penelitian memaparkan fokus seputar kebijakan dengan perumusan, adopsi, dan implementasi langkah-langkah mitigasi sebagai proses politik. kebijakan dapat meringkai mitigasi bahaya sebagai isu penting dalam agenda

masyarakat. Pembuat kebijakan harus mampu dalam mencari cara dan solusi untuk masyarakat yang tahan bahaya sehingga menekan angka korban jiwa dan kerugian harta benda saat bencana terjadi.

Kelima. penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo karyono dalam jurnal *Demokrasi & Otonomi Daerah* Vol. 17 No. 1 januari 2019 dengan judul “Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.” Penelitian memaparkan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak dalam melakukan tindakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di wilayahnya dengan menggunakan metode kualitatif, tidak terlepas dari peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya seperti Bupati, BPBD, Damkar, DLH, Manggala, Relawan Balakar, Perangkat Desa, TNI, POLRI, dan masyarakat setempat.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hamdika, Alfian Miko, dan Afrizal, dalam jurnal *JISPO* Vol. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019 dengan judul “Kesiapsiagaan Komunitas Pesisir Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami (Studi Kasus di Negari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam)”. Penelitian memaparkan kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam menghadapi bencana dengan metode kualitatif deskriptif. Melihat hubungan keduanya menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens. Pemerintah melakukan sosialisasi kebencanaan dan rumah tahan gempa, simulasi kebencanaan, memperbaiki jalur evakuasi secara berkala. Masyarakat siap siaga dalam fenomena bencana dengan

mempraktikan rumah tahan gempa, menyediakan P3K dan obat-obatan untuk pertolongan pertama, mengikuti sosialisasi yang di informasikan pemerintah terkait kebencanaan, memiliki tabungan kesiapsiagaan bencana. Disini dapat terlihat adanya hubungan dualitas (proses saling mempengaruhi) diantara pemerintah sebagai struktur dan masyarakat sebagai agensi.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, adanya persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mitigasi menjadi pilihan pemerintah dalam mengatasi persoalan bencana. Sedangkan, letak perbedaannya adalah penelitian ini berupaya untuk memeperlihatkan bagaimana politik mitigasi banjir dengan tindakan dan keterlibatan dalam proses mitigasi bencana banjir dan penelitian ini dilakukan pada dua lokasi berbeda dengan faktor penyebab yang sama tetapi dampak yang ditimbulkan berbeda. Dengan ini dapat memperkaya hasil dan menjadi pembeda diantara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Politik Mitigasi Banjir

Dalam studi tentang politik mitigasi selalu di tunjukan adanya bencana yang menyertai dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pada politik mitigasi iklim, industri bahan bakar fosil menjadi pihak yang sangat berpengaruh pada perubahan iklim atau pemanasan global. Terdapat perlawanan politik yang kuat dari industri bahan bakar fosil

untuk membentuk respon terbatas terhadap perubahan iklim dan mitigasi iklim dengan dekarbonisasinya.²² Pada politik mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, keberhasilan dalam melakukan mitigasi bencana tidak terlepas dari keterlibatan Bupati, BPBD, Damkar, DLH, Manggala, Relawan Balakar, Perangkat Desa, TNI, POLRI, dan masyarakat setempat.²³

Politik pada dasarnya menjadi usaha dalam penyelesaian konflik (*konflik resolution*) atau konsensus (*consensus*).²⁴ Bencana berakibat pada konflik dikarenakan terdapat resiko atau dampak yang diakibatkan pasca bencana. Fenomena bencana tidak terlepas dari sebuah kebijakan karena menyangkut tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam fenomena bencana.²⁵ Politik mitigasi banjir berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang, dan bagaimana menggunakan kewenangannya dalam studi fenomena bencana banjir. Politik mitigasi banjir melihat pihak-pihak yang terlibat dalam proses terjadinya bencana banjir dan proses mitigasi bencana banjir. Proses terjadinya bencana banjir dapat dijelaskan dengan melihat fenomena bencana banjir yang terjadi akibat faktor manusia.

²²Daniel Nyberg, Christopher Wright, Vanessa Bowden, *Organising Responses to Climate Change The Politics of Mitigation, Adaptation and Suffering*, United Kingdom : Cambridge University Press 2023, hal.43

²³Eko Prasetyo Karyono, *Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Vol. 17 No. 1 Januari 2019, hal.7

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2012, hal. 15

²⁵Burhanudin Mukhamad Faturahman, *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*, PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hal.124

Sedangkan, proses mitigasi bencana banjir dapat dijelaskan dengan keterlibatan pihak-pihak didalam proses mitigasi yang dilakukan.

Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan meliputi, nilai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.²⁶ Politik berkaitan dengan keputusan publik, seperti dengan adanya keputusan melakukan mitigasi dalam satu wilayah yang memerlukan tindakan mitigasi. Mitigasi dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan mengurangi dampak dari sebuah bencana yang terjadi, baik struktural dengan pembuatan bangunan fisik dan non struktural dengan berpacu pada Undang-Undang ataupun penelitian yang pernah dilakukan.²⁷

Fenomena bencana banjir dapat di latar belakang oleh adanya fenomena politik sebagai berikut :

a) Desentralisasi

Persoalan hubungan manusia dengan lingkungan bukan persoalan kepadatan penduduk tetapi persoalan yang disebabkan karena faktor tekanan kekuasaan. Pada cara pandang politik ekologi menekankan bahwa persoalan lingkungan bukan disebabkan karena internal lingkungan tetapi disebabkan karena

²⁶Dinda Samego Anggraheni, Haykal Attamimi, Jumardi, Perkembangan Kerajaan Islam di Banten pada Masa Sultan Ageng Tirtayasa dalam Aspek Politik dan Sosial, PATTINGALLOANG Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol. 7, No. 2 Agustus 2020, hal. 149

²⁷Sularso H.S, Hengkelare, Octavianus H.A, Rogi, Suryono , Mitigasi Risiko Bencana Banjir dimanado, Jurnal Spasial Vol. 8. No. 2 2021, hal. 269

pengaruh eksternal yaitu tekanan politik dan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki korelasi dengan politik dengan adanya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi maka aktor-aktor pemerintah daerah dan perusahaan memiliki kuasa dan kapital dalam menentukan pola dan arah pemanfaatan sumber daya alam. Adanya desentralisasi mengakibatkan kebanyakan aktor di daerah memiliki kontrol atas sumber daya alam dan memunculkan peluang untuk menyalahgunakannya. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dengan dampak-dampak yang ditimbulkan jika pengelolaan lingkungan hidup tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup itu sendiri.²⁸

b) Deforestasi

Dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”. Dalam hal ini pihak investor baik domestik maupun asing difasilitasi dengan kebijakan berupa peluang dan jaminan hukum. Dukungan terhadap kapitalisme ini bersandar pada pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi. Deforestasi merupakan tindakan penebangan

²⁸Samahuddin Muharram, Fadly, Dhena Aldhaliaa, Rosa Pebriandini, Falehah Nabila, Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 7 April 2022, hal. 150

hutan dengan cara menebang kayu ataupun mengubah fungsi dari penggunaan lahan hutan. Pada perspektif ilmu kehutanan deforestasi digambarkan dengan keadaan tiadanya tutupan hutan atau hilangnya fungsi hutan itu sendiri. Dampak dari tindakan deforestasi berimbas kepada banjir yang terjadi di berbagai wilayah atau kawasan sekitar hutan yang diakibatkan karena kurangnya resapan air.²⁹

c) Deterolisasi

Pengabaian hubungan manusia dengan alam yang dilakukan secara sistematis melalui kebijakan pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan mengakibatkan banyak fenomena deterolisasi atau alih fungsi terutama alih fungsi lahan basah. Meningkatnya kebutuhan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan kepentingan modal atau kapital mengakibatkan banyaknya lahan basah yang di alih fungsikan. Pemicu terjadinya perubahan penggunaan lahan di latar belakang oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas pembangunan, dan aktivitas perekonomian. Sepertihalnya banyak aktivitas industri, perdagangan jasa, dan rumah hunian. Aktivitas seperti ini dapat mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem tertentu atau degradasi lingkungan. Deterolisasi adalah alih fungsi dimana deterolisasi lahan basah merupakan alih fungsi

²⁹Andi Tenri Sompia, Arif Rahman Hakim, Dinar Adistiyani, Deforestasi di Kabupaten Banjar dalam Perspektif Politik Lingkungan, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 2 April 2022, hal. 203

lahan basah yang kebanyakan digunakan untuk aktivitas industri. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan ini berakibat pada bencana banjir karena fungsi ekologis lahan basah adalah pengendali banjir. Banjir menjadi bencana nyata dalam kegiatan deterolisasi karena lahan basah merupakan lahan resapan air, sehingga semakin sedikit lahan basah yang tersedia di suatu wilayah maka semakin sedikit juga resapan airnya.³⁰

Berdasarkan politik mitigasi banjir yang telah dipaparkan di atas, keterkaitannya dengan penelitian ini adalah melihat bagaimana tindakan yang diambil pemerintah desa dalam melakukan mitigasi bencana banjir yang terjadi di desa dan melihat pihak-pihak yang terlibat pada proses mitigasi bencana banjir di desa.

2. Agen dan Struktur dalam Teori Strukturasi

Teori strukturasi *Anthony Giddens* menjelaskan adanya hubungan yang berlangsung antara individu dan institusi sosial. Individu (agensi) dan institusi sosial (struktur) keduanya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan karena ini dinamakan “dualitas struktur”. Teori ini lebih kepada membuktikan adanya keberadaan dualitas struktur antara agensi

³⁰Abdurrahman, dkk, Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Banjar: Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 1 April 2022, hal. 149

dan struktur dari pada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat adanya keberadaanya.³¹

Inti dari teori strukturasi ini berfokus pada melihat hubungan antara agensi dan struktur. Jadi agensi dan struktur tidak bisa dipahami secara terpisah, mereka adalah dua sisi koin yang sama. Agen dan struktur bukanlah dua fenomena yang terlepas satu sama lain (dualisme) tetapi mempresentasikan dualitas.³² Dualitas yang dimaksudkan adalah adanya sebuah proses yang saling mempengaruhi diantara agensi dan struktur.

Sebagaimana yang dikemukakan *Giddens*, struktur adalah *rules and resources* (aturan dan sumber daya) dan agensi adalah diambil dari bahasa Inggris *agency* yang diartikan individu dapat dipahami sebagai *perpetrator* (pelaku atau aktor). Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti yaitu: *enabling* (memampukan) dan *constraining* (menghambat). Agensi mempengaruhi struktur karena agensi tidak selamanya harus tunduk pada struktur, agensi dapat mencari kesempatan atau kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang sudah ada. Oleh karena itu, yang menjadi pusat perhatian dalam teori strukturasi bukan struktur dan agensi tetapi *social practice* (praktik sosial) yaitu bagaimana manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud *Giddens* tentang *social practice* adalah

³¹Zainal Abidin Achmad , Anatomy of Structuration Theory and Ideology of The Third Way of Anthony Giddens, JURNAL TRANSLITERA Vol. 9 No. 2 2020, hal. 57

³²George Ritzer dan Douglas J Goodman, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Bantul : Kreasi wacana, 2014), hal.572

hubungan antara negara dan masyarakat, Negara sebagai struktur dan masyarakat sebagai agensi.³³ *Giddens* menstrukturasi mitigasi bencana dan perubahan iklim menggunakan konsep *ensuring state* (Negara yang memastikan).³⁴

Berdasarkan agen dan struktur dalam teori strukturasi dari *Anthony Giddens* keterkaitan teori terhadap penelitian ini adalah melihat proses saling mempengaruhi (dualitas) diantara struktur dan agensi yang terlibat dalam mitigasi bencana banjir. Pemerintah desa dan pihak-pihak diluar pemerintah desa yang ikut serta dalam proses mitigasi bencana banjir sebagai struktur dan masyarakat desa sebagai agensi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³Slamet Subekti, Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa Bali, *Endogami : Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Vol. 3 No. 1 Desember 2019, hal. 58

³⁴Wahyu Hamdika, Alfian Miko, Afrizal, Kesiapsiagaan Komunitas Pesisir Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami (Studi Kasus di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam), *JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019*, hal. 547

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah salah satu hal yang penting dipahami peneliti adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Dengan mengetahui metode yang digunakan, peneliti dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah secara sistematis yang berhubungan dengan pencarian data yang dimuat dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini akan mengklarifikasi suatu fenomena dengan mendeskripsikan variabel yang berkaitan dengan masalah atau unit yang akan diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian untuk mengetahui fenomena atau kejadian sosial dengan menyajikan gambaran secara menyeluruh dan kompleks dalam bentuk naratif. Dilakukan dengan setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud memahami sebuah fenomena dengan detail.³⁵ Penelitian ini mengeksplorasi sebuah fenomena secara mendalam dan mendeskripsikannya dalam bentuk naratif. Sedangkan pendekatan studi

³⁵Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21 No. 1 (2021), hal. 35

kasus sendiri adalah terkait dengan waktu dan tempat yang diangkat dalam penelitian ini.

Jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus sejalan dengan penelitian ini, karena keduanya menjeniskan atau menggambarkan kejadian berdasarkan sebuah fenomena. Fenomena yang diteliti pada penelitian ini berupa fenomena bencana banjir yang terjadi di ruang lingkup desa yaitu Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari kabupaten Lumajang Jawa Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lumajang tepatnya di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pertimbangan peneliti dalam mengangkat dua desa tersebut dalam penelitian, beberapa pertimbangan diantaranya adalah fenomena bencana banjir yang melanda lebih dari satu desa dalam satu kecamatan yang sama, bencana banjir terjadi di waktu yang sama tetapi dengan dampak yang berbeda, dan kedua desa memiliki tindakan dalam mitigasi bencana banjir yang berbeda satu dengan lainnya. Beragam pertimbangan ini yang menjadikan peneliti yakin dalam mengangkat Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo sebagai lokasi pada penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau dijadwalkan kurang lebih dalam 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Desember s/d Juli 2023.

C. Pemilihan Informan dan Objek Penelitian

1. Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat desa di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo. Perangkat desa dapat memberikan informasi terkait tindakan dalam melakukan mitigasi bencana banjir dan keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah desa yang ikut serta dalam proses mitigasi bencana banjir. Masyarakat dapat memberikan informasi terkait dampak yang dirasakan dari tindakan Pemerintah Desa, dampak yang dirasakan atas keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah desa, dan respon inisiatif masyarakat desa dalam proses mitigasi berlangsung. Menurut peneliti dari subjek tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi yang relevan terhadap pembahasan permasalahan pada penelitian ini. Sebab pada proses mitigasi bencana banjir merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau masyarakat saja tetapi memerlukan kolaborasi dari keduanya agar mitigasi bencana banjir yang dilakukan berjalan dengan cepat dan tepat.

2. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono, teknik *purposing sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, makna pertimbangan tertentu disini adalah informan yang dipilih karena dianggap menegetahui dan menguasai sebuah informasi yang dibutuhkan. Informan yang memahami tentang apa yang akan digali dapat sangat mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek penelitian atau situasi social yang diteliti.³⁶ Dengan ini penelitian akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam politik mitigasi banjir pada dua desa yaitu Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mendapatkan informan yang dianggap memiliki informasi secara valid dan tentunya sangat dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini antara lain :

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Desa Purorejo

No.	Nama	Kedudukan
1.	Bapak Nanang Wahyudi	Kepala Desa Purorejo
2.	Bapak Imam Muzani	Sekretaris Desa Purorejo
3.	Bapak Dzaki Tsaqif	Bagian Kesejahteraan Masyarakat
4.	Bapak Musik	Masyarakat
5.	Bapak Heri	Masyarakat
6.	Bapak Rizki Maulana	Masyarakat

³⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 219

7.	Bapak Paimo	Masyarakat
8.	Ibu Sumaidah	Masyarakat

Tabel 3.2
Daftar Nama Informan Desa Tegalrejo

No.	Nama	Kedudukan
1.	Bapak Nyono	Kepala Desa Tegalrejo
2.	Bapak Imam supi'i	Sekretaris Desa Tegalrejo
3.	Bapak Sugiyono	Bagian Perencanaan
4.	Bapak Yohadi	Relawan BPBD/Masyarakat
5.	Bapak Sutrisno	Masyarakat
6.	Bapak Nugroho	Masyarakat
7.	Bapak Mujiono	Masyarakat
8.	Ibu Ismi	Masyarakat

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah politik mitigasi banjir meliputi :

- a) Tindakan Pemerintah Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo dalam mitigasi bencana banjir
- b) Keterlibatan agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir

D. Tahapan Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang hendak diteliti

Untuk melakukan sebuah penelitian tentunya akan memilah dan memahami dengan betul sebuah permasalahan yang terjadi. Karena dengan memahami masalah ini akan menjadikan gambaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Tujuan dilakukannya

sebuah penelitian adalah untuk menjawab dan memecahkan permasalahan. Dengan begini, tahap pertama dalam sebuah penelitian adalah tahap menentukan suatu pokok permasalahan yang diteliti. Setelah dilakukannya analisis terait pokok permasalahan, pentingnya telaah kepustakaan yang mencakup peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak diteliti. Dengan kepustakaan akan memperkaya muatan dalam penelitian, konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dapat juga menemukan jawaban melalui penelitian yang sudah dilakukan. Pokok permasalahan yang akan diteliti meliputi batasan ruang lingkup, latar belakang, dan yang terkait dengan apa yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tema politik mitigasi pasca bencana banjir tingkat desa pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kabupaten Lumajang. Dimana terjadi fenomena bencana banjir yang menerjang Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Banjir terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi dan ditambah dengan erupsi Gunung Semeru. Tanggul Buto Terong yang berada di Desa Purorejo tidak mampu menahan debit air Sungai Gelidik yang terus meningkat dan berakibat pada terendamnya pemukiman penduduk. Sedangkan pada Desa Tegalrejo banjir menerjang pertanian dan perkebunan di area luar tanggul.

2. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah tahap pemilihan topik dan melakukan analisis terkait permasalahan yang di teliti, berikutnya adalah menentukan sebuah metodologi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metodologi sendiri membantu mempermudah penemuan data yang dapat memperkuat penelitian yang akan kita lakukan.

Dengan melewati tahap pengkajian pokok permasalahan, selanjutnya peneliti harus menentukan atau memilih metodologi yang tepat untuk penelitian yang akan dibahas. Peneliti memilih jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi analisis data menggunakan *miles* dan *huberman* yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Menurut peneliti format tersebut relevan dengan fenomena yang ada di lapangan.

3. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, data digali sesuai dengan permasalahan yang menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan peneliti sebagai sumber data yang kredibel. Data dikumpulkan menjadi satu kedalam sebuah penelitian untuk memperkuat argumen didalam penelitian. Dengan data ini maka peneliti tidak dapat

asal-asalan dalam melakukan penelitian, namun berdasarkan data yang ada di lapangan dengan fenomena yang terjadi.

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara bersama dengan 16 informan yang terdiri dari, 3 (tiga) informan Pemerintah Desa Purorejo, 3 (tiga) informan Pemerintah Desa Tegalrejo, 5 (lima) informan masyarakat Desa Purorejo, 5 (lima) informan masyarakat Desa Tegalrejo. Terlebih pengamatan juga dilakukan secara langsung terhadap keadaan dan tingkah laku informan yang ada di lapangan.

4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang sudah didapatkan dari proses pencarian data di lapangan. Didalam pengolahan data meliputi kegiatan *editing data*, merupakan kegiatan pemeriksaan data yang telah didapat dan berusaha menyempurnakan data sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Menyempurnakan data disini melihat apakah data dalam penelitian sudah cukup memperkuat argumen penelitian ataukah belum sepenuhnya memperkuat argumen dalam penelitian, jika didalam data belum sepenuhnya mendukung penelitian maka dilakukan penyempurnaan data dengan mencari data secara mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Pada tahap akhir dalam penelitian adalah melakukan penyusunan laporan penelitian dimana di dalam laporan penelitian mengkomunikasikan tentang apa yang telah diteliti, bagaimana proses di dalam penelitian, dan hasil di dalam penelitian sehingga menemukan sebuah jawaban atas apa yang telah diteliti. Pada tahap ini peneliti perlu memaparkan tentang (1) masalah yang diteliti, (2) metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan (3) hasil yang didapat dari proses melakukan penelitian. Peneliti mengkaitkan dan menyatukan masalah bencana banjir dan politik mitigasi yang terjadi dengan metode yang telah dipaparkan di atas. Hasilnya tertuang kedalam laporan hasil penelitian.

Proses penyusunan yang dilakukan peneliti memakan waktu 8 (delapan) bulan dengan melakukan pengamatan di lapangan. Didalam laporan penelitian ini peneliti mengkaitkan dan menyatukan masalah tindakan dan keterlibatan dalam politik mitigasi banjir dengan metode yang telah dijelaskan dan hasil temuan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan sebuah kondisi atau fenomena yang berkembang di lapangan secara langsung. Subjek dari observasi ini meliputi, aktor, tempat, kegiatan, waktu, dan peristiwa.

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara detail dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena bencana banjir yang terdapat di dua desa yaitu Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo, dimana keduanya terletak pada Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Terkait dengan tindakan Pemerintah Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo dalam mitigasi bencana banjir dan keterlibatan agensi dan struktur dalam mitigasi bencana banjir, berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo dan Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melakukan mitigasi bencana banjir berbeda, begitupun dengan keterlibatannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan menggunakan metode *face to face* untuk dapat mendengar, mengamati, dan

memahami keterangan yang diberikan oleh pihak yang menjadi subjek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai berbagai informan yang dianggap memiliki informasi yang sangat dibutuhkan bagi peneliti dalam penelitian ini. Dengan ini, peneliti mewawancarai 2 (dua) Kepala Desa, 2 (dua) Sekretaris Desa, 2 (dua) pegawai pemerintah desa, dan 8 (delapan) masyarakat desa. Dalam rangka mendukung peneliti dalam melakukan penelitian atau lebih tepatnya dalam melakukan wawancara maka peneliti menggunakan alat bantu berupa *voice recorder* untuk merekam hasil wawancara dan kamera yang dipergunakan untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara bersama dengan informan terpilih dalam penelitian. Pada tahap wawancara ini peneliti telah mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*). Alhasil peneliti memberikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang digunakan dalam menunjang keberhasilan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengolahan dan penyimpanan informasi, baik dalam bentuk tertulis, gambar, ataupun digital. Dokumentasi erat kaitannya dengan data atau dokumen yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan

adanya dokumentasi sendiri menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan sebuah penelitian.

Terkait dengan penelitian ini peneliti mendapatkan dokumentasi yang diperoleh untuk menegaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan benar dan untuk menunjang validitas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena bencana banjir yang terjadi. Dokumentasi ini didapatkan dari hasil terjun lapangan dan ditambah dengan dokumen atau data dari bahan pustaka yang pembahasannya mengarah pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian menggunakan model menurut *Miles dan Huberman* dengan tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan³⁷.

1. Reduksi Data

Teknik analisis data yang pertama dilakukan adalah reduksi data. Di dalam reduksi data sendiri ketika data primer dan data sekunder telah terkumpul maka dilakukan pemilahan data, memfokuskan data sesuai dengan bidangnya, membuang data yang tidak di perlukan, menyusun data untuk menemukan rangkuman dari analisis. Pada intinya yang dikatakan mereduksi data adalah memilah-milah data

³⁷Ibid, hal. 43

yang akan menjadi pendukung dalam penelitian.³⁸ Yang menjadi tujuan dari penelitian yakni sebuah temuan, ketika menemukan suatu data yang baru dan menarik maka data inilah yang diperhatikan dalam mereduksi data.

Dalam reduksi data yang terdapat pada penelitian ini akan membantu dalam menganalisis fokus temuan yang didapati di lapangan. Peneliti memilah dan mengkaji temuan di lapangan terkait politik mitigasi banjir yang memuat tentang tindakan pemerintah berwenang dan bagaimana menggunakan kewenangannya dalam fenomena bencana banjir serta memuat keterlibatan pihak-pihak dalam mitigasi bencana banjir.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah diolah terlebih dahulu, tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, serta pengambilan sebuah tindakan. Untuk mempermudah memahami sebuah data maka perlu mencermati penyajian dalam data. Secara lebih jelasnya penyajian data ini berbentuk narasi, dimana peneliti membuat uraian kalimat untuk menggambarkan sebuah temuan di dalam penyajian data. Data yang

³⁸Dr. Nursapia Harahap, M.A, Penelitian Kualitatif, Medan : Wal Ashri Publishing, Maret 2020, hal. 90

disajikan berurutan dan sistematis menunjukkan adanya hubungan diantaranya.³⁹

Pentingnya konsistenitas hasil penelitian dengan temuan di lapangan, maka penyajian data dalam penelitian ini meliputi; gambaran umum Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo, tindakan dan keterlibatan pemerintah desa dalam mitigasi bencana banjir, agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir.

3. Penarikan Simpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, meskipun pada proses reduksi data kesimpulan sudah ditemukan, namun kesimpulan itu bukan sebuah kesimpulan yang permanen, masih ada penambahan ataupun pengurangan. Berbeda dengan reduksi data dalam penarikan kesimpulan ini telah menemukan kesimpulan permanen dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan secara aktual dan faktual. Data-data yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas serta jelas dengan tujuan menghindari bias.⁴⁰ Dikatakan kesimpulan awal bukan permanen karena pada saat proses kesimpulan dapat berubah sesuai dengan adanya temuan dan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apa bila kesimpulan

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

diawal memuat data yang valid dan konsisten maka kesimpulan akhir bersifat kredibel.

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan dengan lebih cermat, teliti dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan membaca referensi berupa buku, jurnal maupun dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Dalam hal peningkatan ketekunan dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali informasi kepada narasumber dan memeperdalam literatur atau referensi yang berkaitan dengan politik mitigasi banjir dengan lebih cermat, teliti dan berkesinambungan.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang ada. Jika peneliti menggunakan cara ini maka peneliti sudah melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴¹

Triangulasi adalah mengumpulkan data dari berbagai teknik pengumpulan data, ada 3 (tiga) bentuk dalam triangulasi ⁴²:

⁴¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D,(Bandung : Alfabeta) 2014, hal. 247

⁴²Andarusni Alfansyur, Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial, Historis: Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2 December 2020, hal. 149

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengecekan data dengan cara membandingkan sebuah fakta dari sumber atau informan yang berbeda. Dengan teknik yang sama dalam mengumpulkan sebuah data, peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap sumber atau informan yang berbeda.

b) Triangulasi Teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik berusaha mencari tahu dan mencari kebenaran data dengan sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sebuah data dari sumber atau informan yang sama.

c) Triangulasi Waktu

Dengan mencantumkan sebuah waktu dalam data sangat penting untuk kepercayaan sebuah data. sumber atau informan harus diperjelas dengan adanya waktu dalam mencari sebuah data.

3. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian yang terdiri dari :

BAB I : Pada bagian ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konseptual.

BAB II : Pada bagian ini berisikan tentang kajian teoritik yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Pada bagian ini berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, pemilihan informan dan objek penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Pada bagian ini berisikan tentang penyajian dan analisis data dengan menguraikan hasil temuan dan pembahasan dari data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

BAB V : Pada bagian ini adalah bab akhir dalam penelitian yang berisikan simpulan dan saran untuk instansi terkait demi kemajuan di masa yang akan datang.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA TEMUAN

A. Gambaran Umum Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo

1. Fenomena Bencana Banjir di Desa Purorejo dan Tegalrejo

Banjir merupakan akibat dari meluapnya aliran air sungai dimana air sungai melebihi muka air pada normalnya yang mengakibatkan air menggenangi daerah yang lebih rendah di sekitaran sungai dan hal tersebut terjadi akibat dari curah hujan yang lebih tinggi dari pada normalnya.⁴³ Bencana banjir dapat terjadi karena dua faktor, selain akibat dari curah hujan yang tinggi, banjir juga dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan manusia dalam memperlakukan alam. Terkait dengan fenomena bencana banjir juga tidak terlepas dari kurangnya pembuatan kebijakan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya terhadap permasalahan banjir.⁴⁴ Banjir dapat dikatakan sebagai bencana apabila berakibat merugikan atau berdampak bagi manusia.⁴⁵ Berikut dampak bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo meliputi :

⁴³Nurjanah, dkk. "Manajemen Bencana". Bandung: Alfabeta 2012, hal. 14

⁴⁴Bima Ade Prayoga Setiawan, Eka Yulyana, Lina Aryani, "Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7 No.8 Desember 2021, hal.55

⁴⁵Haris Setiawan, dkk, Christopel Adios S, Asri Wahyu Brata, Andi Syaful Jufda, "Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda", Jurnal Geografi Gea, Vol. 20 No. 1 April 2020, hal.40

a. Dampak Bencana Banjir pada Desa Purorejo

Bencana banjir membawa beragam dampak buruk bagi masyarakat yang terdampak. Seperti halnya bencana banjir yang melanda masyarakat Desa Purorejo tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2022. Beragam dampak buruk yang dirasakan masyarakat desa saat banjir terjadi mulai dari trauma mendalam, terendamnya pemukiman penduduk, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, tertutupnya akses jalan oleh material pasir yang terbawa banjir.⁴⁶

1) Trauma Mendalam

Dampak trauma yang dirasakan masyarakat desa cukup nyata. Trauma ini di latar belakang karena banjir yang terjadi pada desa ini sudah terjadi sebanyak dua kali dengan gejala yang sama. Bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo ini menjadi bencana banjir yang ke dua kalinya. Banjir serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1976-1978 yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi yang bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru.⁴⁷ Terkait dengan salah satu dampak ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh bapak Heri-masyarakat yaitu :

⁴⁶Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

⁴⁷Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

“Ya namanya banjir pastinya bikin trauma apalagi banjir yang kemarin itu tiba-tiba airnya masuk pemukiman, warga jadi panik.”⁴⁸

Perasaan trauma yang diakibatkan oleh bencana banjir tidak dapat dikesampingkan karena tentunya sangat mengganggu kondisi psikologis korban bencana banjir. Terlebih bencana banjir tidak hanya terjadi sekali ini saja tetapi pernah terjadi sebelumnya maka perlu mendapatkan perhatian serius dalam penyelesaiannya.

2) Terendamnya Pemukiman Penduduk

Dampak berikutnya adalah kerugian secara materil yang dirasakan masyarakat desa. Arus air Sungai Gelidik yang kencang saat banjir terjadi mengakibatkan Tanggul Buto Terong seluas 200 meter rusak dan akhirnya berimbas kepada pemukiman penduduk desa. Wilayah yang terendam banjir tersebar di berbagai RT dan RW meliputi RT 01 RW 07, RT 01 RW 06, RT 02 RW 06, RT 03 RW 06 Dusun Pasirrejo. Dari kejadian ini total 102 rumah terendam dan 315 jiwa dari 115 KK di evakuasi.⁴⁹

Pemukiman penduduk tergenangi oleh air banjir dari aliran Sungai Gelidik. Dampak tergenangnya pemukiman penduduk desa tentunya sangat merugikan karena selain terendamnya harta benda, banjir ini mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Masyarakat lebih memilih

⁴⁸Bapak Heri – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 19.01 WIB.

⁴⁹Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

untuk menyelamatkan harta benda dan mengevakuasikan diri dari pada harus kembali bekerja.⁵⁰



Gambar 4.1banjir pada pemukiman penduduk.

Sumber : Arsip Imam Muzani (Sekdes)

3) Rusaknya Lahan Pertanian dan Perkebunan

Fenomena bencana banjir bagi Desa Purorejo sangat merugikan masyarakat desa seperti halnya lahan pertanian dan lahan perkebunan yang turut di terjang banjir. Lahan pertanian yang mulanya menjadi area produktif bertani pasca banjir menjadi area yang tidak produktif. Petani mengalami kerugian karena tidak dapat memanen hasil pertanian yang sudah dikerjakannya. Disisi lain lahan perkebunan milik masyarakat desapun tidak luput dari terjang banjir alhasil mengakibatkan kerugian karena tidak dapat memanen hasil perkebunan yang telah dikerjakan. Total lahan pertanian dan perkebunan yang di terjang oleh banjir ini seluas 20 hektar.⁵¹

⁵⁰Bapak Rizki Maulana – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 18.10 WIB.

⁵¹Bapak Heri – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 19.01 WIB.



Gambar 4.2 banjir pada lahan pertanian dan perkebunan.

Sumber : Arsip Imam Muzani (Sekdes)

4) Tertutupnya Akses Jalan

Arus air yang terdapat saat fenomena banjir ini membawa material pasir yang bercampur dengan air banjir. Banyak terdapat material pasir yang terbawa bersamaan saat banjir terjadi. Karena ini lah akses jalan tertutupi oleh material pasir. Tertutupnya akses jalan ini sangat mengganggu dalam proses mitigasi bencana banjir karena dengan kondisi jalan yang tertutup maka perlu tenaga ekstra untuk menuju ke titik lokasi terjadinya bencana banjir.⁵²



Gambar 4.3 Akses jalan.

Sumber : Arsip Imam Muzani (Sekdes)

⁵²Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

b. Dampak Bencana Banjir pada Desa Tegalrejo

Fenomena bencana banjir menjadi fenomena bencana yang patut untuk mendapatkan perhatian khusus. Sepertihalnya fenomena bencana banjir yang terjadi pada 17 Oktober 2022 tepatnya di Desa Tegalrejo Kabupaten Lumajang. Wilayah desa yang bersebelahan dengan Sungai Gelidik menjadikan bencana banjir adalah bencana yang perlu diwaspadai.

Berbicara bencana banjir yang terjadi di desa perlu diketahui bahwa bencana banjir yang terdapat di Desa Tegalrejo ini berbeda dengan bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo. Banjir pada Desa Tegalrejo tidak masuk ke wilayah pemukiman penduduk akan tetapi banjir ini menghabiskan seluruh area pertanian dan perkebunan milik masyarakat desa. Dampak bencana banjir yang terdapat pada Desa Tegalrejo meliputi rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan terhambatnya aktivitas nelayan.⁵³

1) Rusaknya Lahan Pertanian dan Perkebunan

Terdapat fenomena menarik yang dapat ditemukan di desa ini yakni adanya wilayah yang memiliki sebutan tanah jogelo. Tanah jogelo ini sebenarnya menjadi pelambang atau peringatan terhadap setiap masyarakat desa yang memiliki pertanian dan perkebunan di tanah jogelo ini. Dikatakan jogelo karena ketika pertanian dan

⁵³Bapak Imam Supi'i – Sekertaris Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

perkebunan yang sudah dirawat dapat sewaktu-waktu hanyut dan hilang karena banjir yang datang.⁵⁴

Tanah jogelo ini bukan termasuk wilayah desa dalam artian tanah ini berada pada kawasan diluar tanggul. Masyarakat memanfaatkan area yang subur ini untuk melakukan pekerjaan bertani dan berkebun. Adanya fenomena tanah jogelo ini tidak terlepas dari petani dan pekebun yang tidak memiliki lahan akhirnya memilih untuk bertani dan berkebun di tanah jogelo ini. Bencana banjir yang terjadi pada Desa Tegalrejo berdampak pada gagal panen yang dialami oleh masyarakat desa atau petani dan pekebun yang memiliki pertanian atau perkebunan di area tanah jogelo. Sejalan dengan dampak yang terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan, hal ini juga diungkapkan oleh bapak Sutrisno-masyarakat bahwa :

*“Petani yang punya lahan di jogelo itu yang rugi la wong tandangan habis keterjang banjir. Tapi namanya tanah jogelo ya ndak nyalahin siapa-siapa”.*⁵⁵

Dari sini mendapat gambaran bahwa lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana adalah yang berada pada area tanah jogelo bukan lahan pertanian dan perkebunan di area dalam desa.

⁵⁴Bapak Sutrisno – Masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 pukul 07.34 WIB.

⁵⁵Bapak Sutrisno – Masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 pukul 07.34 WIB.



Gambar 4.4 banjir pada lahan pertanian dan perkebunan.

Sumber : Arsip Imam Supi'i (Sekdes)

2) Terhambatnya Aktivitas Nelayan

Fenomena menarik berikutnya adalah bahwa ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memilih untuk mencari ikan di wilayah Pantai Licin atau pantai yang ikut wilayah Malang. Masyarakat Desa Tegalrejo menyebutnya dengan “nelayan andon” yakni nelayan yang bordinisili di wilayah Tegalrejo tetapi memilih mencari ikan di luar wilayah Tegalrejo. Aktivitas para nelayan terganggu hal ini terjadi karena akses jalan yang menuju lokasi pantai terputus dikarenakan terseret banjir. Untuk nelayan maka nelayan andonlah yang terdampak akibat adanya bencana banjir yang terjadi di Desa Tegalrejo.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Nugroho yang menyatakan bahwa :

“Nelayan ndak bisa lanjut nyari ikan kalau air sungai naik apalagi pas banjir, akses jalan kesana itu (pantai) yang ndak bisa di lewati. nelayan andon butuh perjuangan buat nyari ikan karena kalau air sungai naik ya ndak bisa berangkat.”⁵⁷

⁵⁶Bapak Yohadi – Masyarakat Desa Tegalrejo dan Relawan BPBD Kec. Tempursari. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.20 WIB.

⁵⁷Bapak Nugroho – Masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 08.45 WIB.

Akses jalan nelayan andon yang terputus ini terbuat dari bambu dan dirancang sederhana menyerupai jembatan pada umumnya. Akses jalan ini dikenal dengan nama Jembatan Seseek.



Gambar 4.5 Akses jalan nelayan andon.

Sumber : Arsip Imam Supi'i (Sekdes).

2. Kondisi Geografi Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo

Desa Purorejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Desa Purorejo memiliki 4 (empat) dusun diantaranya Dusun Purorejo, Dusun Pasirrejo, Dusun Umbulrejo, Dusun Sukosari. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 921.279,4 ha. Dengan pembagian luas lahan sebagai berikut, pemukiman penduduk sebesar 67.583 ha, pertanian sebesar 102.100 ha, perkebunan sebesar 751.543 ha, fasilitas umum sebesar 2 ha, dan pemakaman umum sebesar 3,25 ha. Pada bagian utara berbatasan dengan Desa Kaliuling dan Desa Pandungsari, pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Tegalrejo, pada bagian timur berbatasan dengan Desa Tempursari, Desa

Tempurejo, dan Desa Bulurejo, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Malang Cekopo.⁵⁸



Gambar 4.6 Kantor Desa Purorejo.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

Desa Purorejo menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, Hamparan lahan pertanian dan perkebunan menjadikan desa ini penghasil hasil bumi yang cukup baik. Diluar dari pertanian dan perkebunan desa ini masih memiliki potensi-potensi sumber daya alam lainnya, seperti air terjun di balik hutan belantara yang tentunya memiliki nilai keindahan tersendiri bagi pengunjungnya. Tidak hanya itu sumber mata air yang melimpah menjadi potensi tersendiri seperti dengan adanya sumber mata air umbulan yang digunakan sebagai tempat wisata berendam dan berenang di air yang jernih.

Desa Tegalrejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Desa Tegalrejo menjadi desa terpencil dengan jarak 80 km dari pusat Kabupaten Lumajang. Desa Tegalrejo memiliki 3 (tiga) dusun diantaranya Dusun Tegalrejo, Dusun Tegalsari,

⁵⁸Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

dan Dusun Tegalbanteng. Desa ini memiliki wilayah sebesar 4.997.720 M2. Pada bagian utara berbatasan dengan Desa Purorejo, pada bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, pada bagian timur berbatasan dengan Desa Bulurejo, dan pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Malang.⁵⁹



Gambar 4.7 Kantor Desa Tegalrejo.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

Desa Tegalrejo memiliki pantai yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat setempat. Pantai yang terdapat pada desa ini adalah Pantai Bulu. Dikatakan menguntungkan karena pantai termasuk potensi sumber daya alam desa yang menjadi daya tarik tersendiri pada desa. Dengan adanya Pantai Bulu desa juga diuntungkan karena menyimpan banyak kekayaan laut. Terlebih Desa Tegalrejo ini juga memiliki hamparan lahan pertanian dan perkebunan yang luas sehingga menjadi pengasil bumi yang melimpah. Desa Tegalrejo termasuk kedalam wilayah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 26 derajat celcius dan dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm.

⁵⁹Peraturan Desa, tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2020-2026”, Bab II Profil Desa, 2.2 Kondisi Umum Desa.

3. Kondisi Demografi Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo

Desa Purorejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.010 jiwa dengan rincian sebagai berikut, jumlah penduduk dengan gender laki-laki sebanyak 2.836 jiwa, jumlah penduduk dengan gender perempuan sebanyak 3.174 jiwa, dengan total keseluruhan kepala keluarga mencapai 2.010 (kk). Pendidikan sangat penting untuk diperhatikan terutama pada wilayah atau desa yang jauh dari kota sudah selayaknya patut mendapatkan perhatian khusus. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Purorejo peduli dengan jenjang pendidikan dilihat dari sumber daya manusia berdasarkan jenjang terakhir tingkat pendidikannya meliputi sekolah dasar (SD) sebanyak 1.291 jiwa, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 1.240 jiwa, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 1.181 jiwa, Diploma (D1) sebanyak 22 jiwa, sarjana (S1) sebanyak 1 jiwa.⁶⁰ Desa dengan potensi sumber daya yang memumpuni sangat menguntungkan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam mengelola potensi sumber daya.

Desa Tegarejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.379 jiwa dengan rincian sebagai berikut, jumlah Desa Tegalrejo penduduk dengan gender laki-laki sebanyak 1.688 jiwa, penduduk dengan gender perempuan sebanyak 1.691 jiwa. Peran sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat mendukung untuk kemajuan desa. Sumber daya

⁶⁰LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2018, Bab II Program Kerja Bidang Penyelenggaraan, 2.2 Kependudukan.

manusia yang cakap dapat membantu desa dalam melakukan sebuah kemajuan terhadap desa. Pada Desa Tegalrejo sumber daya manusia dengan jenjang terakhir tingkat pendidikannya meliputi Paud sebanyak 124 jiwa, sekolah dasar (SD) sebanyak 709 jiwa, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 342 jiwa, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 331 jiwa, Diploma (D1) sebanyak 10 jiwa, Sarjana (S1) sebanyak 44 jiwa, sarjana (S2) sebanyak 2 jiwa.⁶¹ Dengan data ini maka dapat dilihat bahwa pendidikan pada Desa Tegalrejo masih mendapatkan perhatian khusus dan masyarakat percaya pentingnya pendidikan bagi sumber daya manusia.

4. Potensi Sumber Daya Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo

a. Potensi Sumber Daya Desa Purorejo

Desa Purorejo menyimpan beragam sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor perkebunan.⁶² Sumber daya alam dapat menjadi potensi yang menguntungkan desa ketika dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dapat bersifat menguntungkan bagi desa ketika terdapat andil besar pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkannya.

⁶¹Peraturan Desa, tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2020-2026”, Bab II Profil Desa, 2.2 Kondisi Umum Desa.

⁶²Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

Beragam potensi sumber daya alam dapat ditemui pada desa ini. Potensi sumber daya alam yang dimiliki pada Desa Purorejo tersebar di beberapa dusun. Seperti pada Dusun Purorejo dengan air terjun Coban Pabrik, Dusun Umbulrejo dengan Umbul Tourism Park, dan Sungai Gelidik yang aliran sungainya melintang di seluruh dusun di Desa Purorejo.⁶³ Beragam keindahan alam yang didapati pada desa ini memiliki potensi wisata yang cukup menarik ketika dikunjungi. Tetapi dengan sumber daya alam yang indah tidak keseluruhan dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

1) Coban Pabrik

Sebagai contoh dapat dilihat pada air terjun Coban Pabrik yang berada tersembunyi di dalam rimbunya hutan. Ketika berkunjung di sini akan didapati belataran hutan hijau dan indah dipandang oleh mata. Air terjun ini airnya sangat jernih dan terjamin kesegarannya namun perlu berhati-hati karena arus air yang terdapat disini cukup deras. Walaupun dengan pemandangan yang indah dan air yang sangat segar untuk berkunjung kesini memerlukan tenaga ekstra karena akses jalan menuju lokasi yang sulit.

⁶³Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.



Gambar 4.8 Coban Pabrikan.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

2) Sungai Gelidik

Berikutnya pada Sungai Gelidik yang rencananya dapat digunakan sebagai objek wisata arum jeram belum dapat terealisasi secara maksimal. Sungai Gelidik sendiri adalah aliran sungai yang sangat lebar dan letaknya pun bersebelahan dengan wilayah desa. Hal yang menjadi hambatan untuk menjadikan Sungai Gelidik sebagai objek wisata adalah tidak stabilnya debit air Sungai Gelidik dan kurang tersedianya peralatan yang menunjang untuk digunakan sebagai objek wisata arum jeram. Terlebih Sungai Gelidik ini juga menjadi aliran air sungai yang berhulu pada Gunung Semeru artinya ada potensi bahaya yang mengintai ketika terjadi erupsi karena dapat saja memuntahkan lahar dingin yang melewati Sungai Gelidik ini. Dengan berbagai hambatan yang ada rencana menjadikan Sungai Gelidik sebagai wisata arum jeram belum dapat terlaksana.



Gambar 4.9Sungai Gelidik.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

3) Umbul Tourism Park

Berbeda dengan Coban Pabrikan dan Sungai Gelidik yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik, pada Umbul Tourism Park telah mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah desa dengan dibukanya wisata ini dapat menjadi potensi objek wisata yang menjanjikan. Fasilitas yang dapat ditemui ketika berkunjung disini adalah terdapat beberapa permainan outbound, terdapat taman yang indah dan luas, terdapat kamar mandi dan kamar ganti, terdapat masjid untuk beribadah, terdapat banyak penjual makanan dan minuman sehingga pengunjung tidak bingung ketika kelaparan. Tidak hanya itu pada wisata ini pengunjung juga dapat menikmati segarnya sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai area berendam dan berenang. Untuk yang tidak bisa berenang disarankan agar menyewa pelampung yang sudah tersedia pada lokasi wisata ini. Akses menuju lokasinyaapun mudah dijangkau karena letaknya yang bersebelahan dengan akses jalan desa.



Gambar 4.10Umbul Tourism Park.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

4) Pertanian dan Perkebunan

Diluar potensi objek wisata, desa ini juga memiliki lahan pertanian dan lahan perkebunan yang sangat luas. Hal ini dapat di buktikan dengan mayoritas masyarakat Desa Purorejo bekerja sebagai petani. Hasil bumi yang melimpah dapat ditemukan pada desa ini, beberapa hasil bumi yang dapat ditemukan pada desa ini adalah padi, jagung, kelapa, pisang, durian, cabai, dan kacang.⁶⁴



Gambar 4.11 pertanian dan perkebunan.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

⁶⁴Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

b. Potensi Sumber Daya Desa Tegalrejo

Sumber daya menjadikan desa memiliki keunggulan dalam sektor tertentu. Sumber daya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat desa ketika sumber daya tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik. Berbicara tentang pemanfaatan sumber daya tidak terlepas dari peran pemerintah desa sebagai pemerintah di tingkat desa yang tentunya memiliki wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada Desa Tegalrejo sumber daya desa yang dimiliki cukup beragam meliputi sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan.⁶⁵

1) Pantai Bulu

Pada sektor pariwisata Desa Tegalrejo memiliki Pantai Bulu dengan keindahan alamnya menjadikan spot wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pantai Bulu memiliki pemandangan yang cukup menarik dimana terlihat bukit-bukit yang mengitari pantai. Ditambah dengan bataran pasir hitam yang luas dan ombak yang stabil menjadikan pantai ini aman untuk pengunjung yang ingin berkunjung disini.

Ketika melakukan sebuah perjalanan menuju tempat wisata banyak ditemukan akses jalan yang sulit tetapi hal ini tidak berlaku bagi pengunjung yang ingin berwisata di Pantai Bulu. Pantai Bulu

⁶⁵Bapak Nyono – Kepala Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.20 WIB.

telah mendapatkan perhatian pemerintah desa dapat dilihat dari akses jalan menuju lokasi sangat mudah karena kondisi jalan masih sangat baik dan aman. Selain memiliki potensi wisata Pantai Bulu juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam tergambar oleh hasil laut yang didapat para nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa selain dapat menjadi tempat wisata Pantai Bulu juga dapat memberikan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat yang memilih bekerja sebagai nelayan.



.Gambar 4.12 Pantai Bulu.

Sumber : Dokumentasi peneliti

2) Pertanian dan Perkebunan

Diluar sektor pariwisata, Desa Tegalrejo memiliki banyak lahan pertanian dan perkebunan. Tanah yang subur untuk dilakukan kegiatan bertani dan berkebun membawa dampak yang positif bagi desa. Potensi sumber daya desa dari hasil kegiatan bertani dan berkebun meliputi padi, jagung, kelapa, pisang, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran.⁶⁶ Setiap potensi sumber daya desa yang

⁶⁶Bapak Imam Supi'i – Sekertaris Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa.



Gambar 4.13 pertanian dan perkebunan.

Sumber : Dokumentasi peneliti.

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purorejo dan Masyarakat Desa Tegalrejo

a. Mata Pencaharian Desa Purorejo

Mata pencaharian pada Desa Purorejo ini banyak di pengaruhi oleh kondisi alam atau potensi yang terdapat di desa. Bagi masyarakat desa keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam sangat penting terutama dapat menjadi sumber mata pencaharian. Matapencaharian menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya dapat dikatakan adanya keterkaitan antara kondisi alam atau potensi sumber daya desa terhadap mata pencaharian masyarakat desa.

Berikut mata pencharian masyarakat Desa Purorejo meliputi :

1) Petani dan Pekebun

Hasil pengerjaan lahan pertanian dan perkebunan yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Purorejo mengakibatkan desa ini melimpah

akan hasil bumi seperti padi, jagung, kelapa, durian, pisang, cabai, dan kacang. Dengan kondisi tanah yang subur desa ini mampu menghasilkan produk hasil bumi yang baik dan layak untuk dipasarkan. Banyaknya masyarakat Desa Purorejo yang memilih sebagai petani dan pekebun dikarenakan tanah yang subur, lahan yang luas, dan dapat dilakukan kegiatan bertani dan berkebun.

2) Pedagang

Selain sebagai petani dan pekebun sebagian dari masyarakat Desa Purorejo juga memilih berdagang. Pedagang disini berdagang bermacam-macam kebutuhan sehari-hari yang diperjual belikan di lingkungan masyarakat setempat.⁶⁷ Di dalam lingkup desa terdapat banyak sekali masyarakat desa yang membuka toko-toko baik yang menjual kebutuhan makanan sehari-hari ataupun menjual perabotan rumah tangga. Selain berdagang dengan membuka toko masyarakat juga berdagang dengan menjual kebutuhan makanan sehari-hari di pasar yang terdapat di desa.

Dapat dikatakan bahwa secara signifikan mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Purorejo adalah sebagai petani, pekebun, dan pedagang. Kondisi tanah yang subur sangat mempengaruhi desa ini sebagai penghasil hasil bumi yang cukup baik dan tentunya menguntungkan bagi masyarakat desa.

⁶⁷Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

b. Mata Pencaharian Desa Tegalrejo

Berbicara tentang mata pencaharian sebenarnya memiliki korelasi atau keterkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Potensi sumber daya yang diketahui dan dimanfaatkan dengan baik membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat desa. Dapat dilihat dari berbagai potensi sumber daya desa yang terdapat di Desa Tegalrejo membawa dampak baik bagi masyarakat. Berikut mata pencaharian masyarakat Desa Tegalrejo meliputi :

1) Nelayan

Dengan memiliki potensi sumber daya desa berupa pantai menjadikan beberapa masyarakat desa memilih bekerja sebagai nelayan. Nelayan pada Desa Tegalrejo dapat mencari pundi-pundi keuntungan dari mencari ikan. Nelayan diuntungkan karena ombak yang terdapat pada Pantai Bulu ini dapat dikatakan relatif stabil. Ombak yang stabil dapat meminimalisir resiko nelayan yang ingin berpergian mencari ikan. Masyarakat Desa Tegalrejo yang bekerja sebagai nelayan dalam mencari ikan di lautan memanfaatkan perahu sederhana yang digunakan nelayan pada umumnya ketika mencari ikan.

2) Petani dan Pekebun

Sebagian masyarakat lainnya memilih bekerja sebagai petani dan pekebun. Hasil melimpah dari kegiatan bertani dan berkebun tidak

terlepas dari aspek penunjang yang dimiliki desa ini. Pada Desa Tegalorejo memiliki perairan yang cukup untuk melakukan kegiatan bertani dan berkebun. Desa Tegalorejo juga memiliki tanah yang subur dan cocok untuk aktivitas bertani dan berkebun. Hasil dari bertani dan berkebun meliputi padi, jagung, kelapa, pisang, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tegalorejo sebagai petani, pekebun, dan nelayan.⁶⁸

B. Tindakan dan Keterlibatan dalam Mitigasi Bencana Banjir

1. Tindakan Pemerintah Desa Purorejo dalam Mitigasi Bencana Banjir

Fenomena bencana memerlukan tindakan dan upaya yang cepat dari pemangku kepentingan setempat. Seperti halnya fenomena bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo pastinya memerlukan upaya berupa tindakan konkrit dari Pemerintah Desa Purorejo sebagai pemerintah di tingkat desa. Di lain sisi mitigasi bencana banjir memerlukan tindakan serius dari pemerintah yang proaktif terhadap kebencanaan yang terjadi di lingkungannya.

Mitigasi bencana banjir memerlukan kerjasama dari seluruh elemen yang terkait agar pada prosesnya menemukan titik keberhasilan. Bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah desa melihat aspek urgensi

⁶⁸Bapak Nyono – Kepala Desa Tegalorejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.20 WIB.

dari dampak yang diterima masyarakat. Bentuk tindakan ini adalah buah hasil dari apa yang diperlukan agar bencana banjir cepat teratasi. Berikut beragam tindakannya meliputi :

a. Pelaporan Kejadian dan Pendataan

Beragam tindakan yang dilakukan Pemerintahan Desa Purorejo diantaranya adalah tindakan secara administratif pemerintah desa dengan pendataan masyarakat yang terdampak bencana dan melakukan pelaporan terkait bencana yang terjadi di desa kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan pemerintah desa dalam mitigasi bencana banjir pada desa.⁶⁹ Pendataan ini juga dibutuhkan untuk mendata dengan tepat siapa yang berhak diberikan bantuan akibat terdampak bencana banjir.

b. Pengkoordinasian Lapangan

Pentingnya sebuah kordinasi antara pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana banjir sangat diperlukan mengingat mitigasi bencana banjir memerlukan kerjasama atas pemerintah terkait pengentasan bencana banjir yang terjadi pada desa. Karena pada proses mitigasi bencana banjir memerlukan kerjasama sebagai komitmen terhadap pengentasan bencana banjir maka pemerintah desa melakukan tindakan kordinasi. Kordinasi dilakukan oleh pemerintah desa terhadap beberapa elemen-elemen yang terkait dalam kebencanaan.

⁶⁹Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

Tindakan kordinasi ini dilakukan agar saat melakukan mitigasi dapat teratasi dengan cepat dan tetap sasaran. Kordinasi menjadi sebuah penyatuan komitmen langkah dan tindakan yang akan di ambil agar mitigasi bencana banjir dapat dilakukan satu komando. Kordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Purorejo saat terjadi bencana banjir berjalan penuh kehati-hatian agar menemukan kejelasan dalam melakukan mitigasi. Kordinasi juga dilakukan secara cepat dan singkat hal ini dikarenakan agar dapat segera melakukan evakuasi yang akan dilakukan pasca berkordinasi. Dikatakan cepat dan singkat karena kordinasi ini dilakukan langsung pada titik yang terkena bencana banjir. Kordinasi melibatkan Perangkat Desa, koramil setempat, Kepolisian setempat, BPBD Lumajang, dan relawan-relawan.⁷⁰



Gambar 4.14 Pengkoordinasian.

Sumber : Arsip Dzaki Tsaqif (Bag. kesejahteraan masyarakat)

c. Penyisiran Lapangan dan Pemantauan Debit Air

Disaat kordinasi di lapangan ini telah dilakukan maka tindakan berikutnya adalah melakukan penyisiran dan pemantauan kondisi banjir yang terjadi pada desa agar tetap memiliki kewaspadaan akan banjir

⁷⁰Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

susunan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adanya tindakan penyisiran dan pemantauan yang dilakukan pasca melakukan kordinasi dipergunakan untuk mengantisipasi adanya bencana banjir susulan, dan dipergunakan untuk mengetahui persis kondisi nyata di lapangan.

Alhasil ketika gambaran nyata sebuah bencana sudah dapat disimpulkan akan mempermudah dalam pengambilan keputusan saat melakukan mitigasi bencana banjir. Penyisiran ini dilakukan di area keseluruhan yang terdampak dari adanya bencana banjir. Sedangkan pemantauan dilakukan di titik tanggul yang rusak akibat terjangan bencana banjir.⁷¹



Gambar 4.15 Penyisiran dan Pemantauan.

Sumber : Arsip Imam Muzani (Sekdes)

d. Evakuasi

Setelah melakukan penyisiran dan mengetahui situasi dan kondisi di lapangan tindakan berikutnya adalah melakukan evakuasi yang ditujukan bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana banjir. Evakuasi yang dilakukan memiliki target dalam prosesnya yaitu

⁷¹Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

mengevakuasi masyarakat desa dan mengevakuasi barang berharga masyarakat desa. Tindakan evakuasi yang dilakukan bertujuan dalam meminimalisir resiko terburuk dari adanya sebuah bencana banjir.

Evakuasi dapat meminimalisir dari adanya korban jiwa saat bencana banjir terjadi. Evakuasi masyarakat ini dilakukan pada tenda-tenda darurat yang telah dipersiapkan. Pemerintah desa melakukan evakuasi pada masyarakat desa di tempat yang sudah disediakan yang tentunya aman dari lokasi banjir. Tetapi banyak juga yang memilih mengungsi ketempat saudara yang aman dan jauh dari lokasi terjadinya bencana banjir.⁷² Selain mengevakuasi masyarakat desa evakuasi juga dilakukan terhadap harta benda. Evakuasi harta benda ini dilakukan dengan peralatan yang sederhana untuk mengangkat barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Terkait dengan evakuasi yang dilakukan mendapat respon positif dari masyarakat desa yang terdampak bencana banjir. Hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Ibu sumaidah-masyarakat desa yang menyatakan bahwa :

“Jadi evakuasi ini membantu masyarakat, masyarakat ndak perlu repot-repot mengangkat prabotan sendiri.Untung evakuasi cepat soalnya banjir tiba-tiba naik.”⁷³

⁷²Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

⁷³Ibu Sumaidah – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 12.14 WIB.

Pada intinya proses evakuasi yang dilakukan membantu masyarakat agar terhindar dari kerugian yang lebih besar akibat bencana banjir.



Gambar 4.16 Evakuasi.

Sumber :Arsip Imam Muzani (Sekdes)

e. Pembersihan Akses Jalan

Setelah tindakan evakuasi yang dilakukan secara cepat, maka beralih pada pembersihan jalur atau akses jalan yang diakibatkan oleh material pasir yang terbawa banjir agar mempermudah akses untuk menuju lokasi terjadinya bencana banjir. Pada proses pembersihan jalan dari material pasir yang terbawa oleh banjir semua dilakukan bersama-sama dan bergotong royong satu sama lain. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh bapak Paimo-masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Kemarin pas banjir, jalan-jalan kotor banyak pasir ya mklum banjirnya bawa pasir. Jalan-jalan yang kotor itu dibersihkan bareng-bareng soalnya masyarakat sini sudah terbiasa gotongroyong.”⁷⁴

⁷⁴ Bapak Paimo – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari kamis, 16 Maret 2023 pukul 12.25 WIB.

Pembersihan akses jalan ini menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, skrop, dan mesin penembak air.⁷⁵ Pembersihan akses jalan ini bertujuan untuk percepatan tindakan mitigasi bencana banjir yang terjadi pada desa. Ketika akses jalan mudah dilalui artinya mempermudah juga bantuan yang masuk untuk keperluan masyarakat desa.



Gambar 4.17 Pembersihan akses jalan.

Sumber :Arsip Imam Muzani (Sekdes)

f. Bantuan Kebencanaan

Fenomena bencana banjir hadir dalam berbagai ancaman yang mendesak sepertihalnya ancaman ekonomi masyarakat desa. Menanggapi adanya bencana banjir yang tentunya menghambat masyarakat dalam mencari kebutuhan sehari-hari atau aktivitas ekonominya terhambat maka pemerintah desa memiliki gagasan untuk dilakukannya pemberian bantuan berupa sembako bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir berupa beras, minyak, gula, dan mie instan.

⁷⁵Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

Adanya bantuan sembako untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir ini adalah buah dari keinginan masyarakat desa akan bantuan sembako dan direalisasikan pemerintah desa sebagai bentuk upaya bantuan dari pemerintah desa. Penerima bantuan sembako ini adalah sesuai dari hasil pendataan yang dilakukan diawal saat banjir melanda desa.⁷⁶ Terkait bantuan yang diberikan pada masyarakat, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Musik-masyarakat yang mengungkapkan bahwa :

“Saat banjir itu warga butuh bantuan terutama sembako, sembako yang diberikan ini tidak semuanya dapat, ya yang dapat itu cuman yang terdampak banjir saja.”⁷⁷

Pembagian bantuan kebencanaan yang dilakukan mendapat respon positif dari masyarakat terdampak bencana banjir. Dengan menggunakan data dapat meminimalisir adanya kekeliruan pada saat pembagian bantuan.



Gambar 4.18 Pemberian bantuan.

Sumber :Arsip Imam Muzani (Sekdes)

⁷⁶Bapak Dzaki Tsaqif- Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada Kamis, 16 Maret 2023 pukul 20.04 WIB.

⁷⁷Bapak Musik – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 11.03 WIB.

g. Pemasangan Bronjong

Bronjong adalah kawat baja berisi bebatuan yang fungsinya untuk memperkuat konstruksi bangunan. Pada fenomena bencana banjir pada Desa Purorejo kawat bronjong ditata sesuai pada titik tanggul yang rusak agar dapat menghalau debit air sungai atau banjir yang masuk menuju pemukiman penduduk. Pemasangan bronjong yang dilakukan pada Tanggul Buto Terong ini menjadi sorotan utama Pemerintah Desa Purorejo dalam mitigasi bencana banjir, karena bencana banjir yang menerjang pemukiman penduduk ini diakibatkan oleh tanggul yang rusak sepanjang 200 meter.⁷⁸ Serta dengan adanya bronjong yang dipasangkan pada titik tanggul yang rusak akan dapat meminimalisir adanya bencana banjir yang terulang di desa.

Pemasangan bronjong sangat membantu masyarakat Desa Purorejo agar terhindar dari bencana banjir. Dengan pemasangan bronjong pada titik tanggul yang rusak dapat memperkuat tanggul dan mengembalikan fungsi tanggul yaitu sebagai penahan debit air sungai atau air banjir yang masuk pada wilayah desa. Alasan inilah yang menjadikan pemasangan bronjong pada tanggul penting dilakukan.

⁷⁸Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.



Gambar 4.19 Pemasangan bronjong.

Sumber :Arsip Imam Muzani (Sekdes)

2. Tindakan Pemerintah Desa Tegalrejo dalam Mitigasi Bencana Banjir

Fenomena bencana banjir menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang berada di Desa Tegalrejo Kabupaten Lumajang. Potensi adanya bencana banjir menjadi sorotan bagi Pemerintah Desa Tegalrejo. Dikatakan berpotensi terjadi bencana banjir dikarenakan antara wilayah desa dengan aliran Sungai Gelidik berdampingan dan hanya dibatasi oleh tanggul yang dinamakan Tanggul Tegalrejo. Dengan kondisi wilayah yang berpotensi terjadi bencana banjir maka perlu adanya sebuah tindakan nyata dari pemerintah desa dalam mengatasinya. Berikut beragam tindakannya meliputi :

a. Sosialisasi dan Simulasi Bencana

Sosialisasi terkait kebencanaan menjadi sebuah aspek yang penting dan perlu dipertimbangkan bagi wilayah yang memiliki resiko kebencanaan. Seperti pada Desa Tegalrejo yang memiliki resiko

kebencanaan meliputi tsunami, gempa bumi, dan banjir.⁷⁹ Sosialisasi tentang kebencanaan menjadi hal yang penting mengingat adanya ancaman resiko bencana yang telah nyata terdapat di desa. Dengan melakukan sosialisasi kebencanaan maka masyarakat menjadi mengerti bahaya yang mengancam ketika terjadi bencana. Terlebih dengan adanya sosialisasi kebencanaan menjadikan masyarakat memiliki sifat waspada terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

Menanggapi persoalan resiko kebencanaan Pemerintahan Desa Tegalrejo mengambil sebuah tindakan berupa sosialisasi terkait kebencanaan.⁸⁰ Sosialisasi kebencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Tegalrejo dilaksanakan di tanah lapang dengan mengumpulkan seluruh masyarakat desa agar dapat mengikuti acara sosialisasi kebencanaan ini. Dalam kegiatan sosialisasi kebencanaan ini masyarakat diajak untuk memahami tanda-tanda alam yang dapat dirasakan saat sebelum terjadinya bencana, dan melakukan gladi kebencanaan atau simulasi bencana.

Dengan tiga resiko bencana yang terdapat di desa meliputi tsunami, gempa, dan banjir maka tanda-tanda alam yang dapat dirasakan saat terjadi bencana tsunami adalah surutnya air laut secara tiba-tiba dan adanya suara gemuruh yang berasal dari lautan. Tanda-tanda alam berikutnya adalah saat terjadi bencana gempa maka masyarakat harus

⁷⁹Bapak Yohadi – Masyarakat Desa Tegalrejo dan Relawan BPBD Kec. Tempursari. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.20 WIB.

⁸⁰Bapak Imam Supi'i – Sekertaris Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

mengetahui secara dini kekuatan gempa tersebut. Bencana gempa yang memiliki kekuatan besar mampu untuk menjatuhkan perabotan-perabotan rumah. Ketika hal ini terjadi maka masyarakat dihimbau agar cepat melakukan evakuasi ke tempat yang aman karena ditakutkan akan menjadi pemicu gelombang tsunami.

Terkait bencana banjir tanda-tanda alam yang dapat diketahui adalah hujan yang tidak kunjung usai dan peningkatan debit air sungai.⁸¹ Ketika debit air sungai sudah dirasa membahayakan dan mendekati batas tanggul maka masyarakat dihimbau segera melakukan evakuasi mandiri ke dataran yang lebih tinggi atau menjauhi kawasan tanggul.

Simulasi bencana menjadi kegiatan yang penting untuk dilakukan terhadap wilayah yang memiliki potensi bencana seperti pada Desa Tegalrejo. Simulasi bencana ini membantu masyarakat dalam langkah cepat terhadap evakuasi mandiri saat terjadi bencana. Pada momentum kegiatan geladi kebencanaan atau simulasi bencana mempraktekan jalur-jalur yang dapat dilalui saat terjadi bencana beserta tempat yang aman terhadap bencana. Tempat yang menjadi titik evakuasi aman terhadap ancaman bencana adalah kantor Desa Tegalrejo dan Gunung

⁸¹Bapak Yohadi – Masyarakat Desa Tegalrejo dan Relawan BPBD Kec. Tempursari. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 10.20 WIB.

Kursi. Letak Gunung kursi ini di dataran tinggi yang menjadi tempat sangat aman ketika ancaman bencana datang.⁸²



Gambar 4.20 Sosialisasi dan Simulasi bencana.

Sumber :Arsip Sugiyono (Bag. Perencanaan)

b. Permohonan Rehabilitasi Tanggul

Diluar kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan, Pemerintah Desa Tegalrejo merespon ancaman bencana banjir yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan tindakan berupa membuat surat permohonan rehabilitasi tanggul kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Permohonan rehabilitasi tanggul terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah upaya pemerintah desa dalam rangka memperhatikan keselamatan masyarakat desa terutama terhadap ancaman bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi di desa. Kondisi tanggul sebelum terjadi banjir dapat dikatakan dalam keadaan sempurna dan masih kokoh namun saat setelah terjadi banjir tanggul mengalami pengikisan terutama terhadap tanggul utama Tegalrejo. Upaya

⁸²Bapak Imam Supi'i – Sekertaris Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

permohonan rehabilitasi tanggul ini diakibatkan oleh dampak yang diberikan saat terjadi banjir salah satunya adalah terkikisnya tanggul utama yang menjadi penghalang banjir.⁸³

Kekhawatiran masyarakat juga menjadi alasan pemerintah desa dalam mengirimkan surat permohonan rehabilitasi tanggul ini. Masyarakat menjadi khawatir terhadap kondisi tanggul pasca banjir. Masyarakat khawatir terhadap dampak yang disebabkan ketika terjadi banjir susulan. Banjir dengan arus yang sangat deras memungkinkan merobohkan tanggul karena tanggul tidak dalam kondisi yang prima. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Mujiono-masyarakat setempat yang menyatakan bahwa :

*“Warga desa takut dengan kondisi tanggul karena air sungai cepat meluap saat hujan deras apalagi seperti saya yang rumahnya bersebelahan tanggul”.*⁸⁴

Banyak rumah penduduk yang lokasinya terletak dekat disekitar kawasan tanggul dan hal ini menimbulkan kegelisahan dari pemilik rumah karena bisa saja sewaktu-waktu tanggul tidak lagi dapat menahan debit air Sungai Gelidik.

⁸³Bapak Imam Supi'i – Sekertaris Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

⁸⁴Bapak Mujiono – Masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 13.05 WIB.

c. Pemantauan Berkala Debit Air

Bencana banjir menjadi anacaman nyata bagi masyarakat Desa Tegalrejo. Dalam kondisi bencana banjir memungkinkan bertambahnya debit air yang akan sangat membahayakan bagi masyarakat desa. Mengingat kondisi debit air yang terus mengalami peningkatan maka Pemerintah Desa Tegalrejo mengambil sebuah tindakan dengan melakukan pemantauan berkala terhadap debit air Sungai Gelidik. Tindakan pemantauan berkala ini bertujuan untuk langkah persiapan evakuasi masyarakat Desa Tegalrejo.⁸⁵

Dengan dilakukan pemantauan berkala menjadi langkah kewaspadaan dan antisipasi bencana banjir. Pemantauan debit air Sungai Gelidik ini dilakukan di Tanggul Tegalrejo dimana tanggul inilah pembatas antara debit air dan wilayah pemukiman penduduk masyarakat Desa Tegalrejo. Tetapi pada praktiknya tindakan ini mendapatkan kritikan seperti yang diungkapkan oleh ibu Ismi-masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Perangkat desa hanya wira-wiri ngecek tanggul tidak ada tindakan lebih padahal air sungai sudah tinggi, sudah takut wong rumah saya di sebelah tanggul pas.”⁸⁶

Pemantauan berkala ini mendapatkan kritikan karena dalam pengaplikasiannya kurang informatif terhadap masyarakat utamanya yang berada di area dekat tanggul.

⁸⁵Bapak Nyono – Kepala Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.20 WIB.

⁸⁶Ibu Ismi – Masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 13.24 WIB.



Gambar 4.21 Pemantauan debit air Sungai Gelidik.

Sumber :Arsip Imam Supi'i (Sekdes)

d. Mempersiapkan Evakuasi

Urgensi tindakan evakuasi dalam fenomena bencana banjir patut menjadi sorotan. Evakuasi saat terjadi bencana banjir sebagai wujud penyelamatan dari ancaman kerugian secara materi sampai dengan korban jiwa. Tindakan persiapan evakuasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam menanggapi bencana banjir pada desa dilakukan dengan mempersiapkan kantor desa sebagai tempat evakuasi dan mempersiapkan kendaraan berupa ambulan sebagai aset desa untuk mengangkut lansia ketika evakuasi berlangsung.⁸⁷Tindakan mempersiapkan evakuasi ini dilakukan karena debit air Sungai Gelidik sudah dalam keadaan yang membahayakan.

Hal yang menjadi catatan peneliti di sini adalah tidak adanya kebijakan tentang mitigasi bencana banjir yang tertuang di dalam Perdes (Peraturan Desa) baik Pemerintah Desa Purorejo dan Pemerintah Desa Tegalrejo. Desa Purorejo dengan potensi bencana banjir dan Desa

⁸⁷Bapak Nyono – Kepala Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.20 WIB.

Tegalrejo dengan potensi bencana meliputi tsunami, gempa bumi, dan banjir seharusnya memiliki kebijakan secara tertulis di dalam Perdes (Peraturan Desa) yang nantinya menjadi kerangka acuan Pemerintah Desa Tegalrejo dalam bertindak saat terjadi bencana seperti bencana banjir yang nyatanya terjadi di desa.

Hal yang membedakan tentang adanya sebuah kebijakan mitigasi bencana banjir pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo adalah pada Desa Purorejo kebijakan tentang mitigasi bencana memang tidak pernah direncanakan dan dibuat di dalam Perdes (Peraturan Desa) tetapi pada Desa Tegalrejo kebijakan tentang mitigasi bencana pernah direncanakan dan dibuat sebagai Perdes (Peraturan desa) Tegalrejo, ini dibuktikan dengan adanya Perdes (Peraturan Desa) Tegalrejo Nomor 09 tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2020.⁸⁸

Disini dapat dilihat bahwa terdapat rentan waktu 2015 sampai 2020 saja. Penting untuk diulas karena seharusnya kebijakan ini dapat di perbarui agar menjadi kebijakan yang secara resmi dan tertulis di dalam Perdes (Peraturan Desa) sebagai kerangka acuan kerja Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mengambil tindakan saat terjadi bencana seperti bencana banjir yang nyatanya terjadi di desa.

⁸⁸Peraturan Desa Tegalrejo No. 09 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2020.

3. Prioritas dan Hambatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir

a. Prioritas dan Hambatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Purorejo

Dalam setiap proses yang berkaitan dengan mitigasi bencana banjir ada tindakan prioritas dan ada hambatan yang ditemui. Tindakan yang menjadi arus utama atau prioritas dalam mitigasi bencana banjir pada Desa Purorejo adalah dengan pemasangan bronjong di sekitar Tanggul Buto Terong yang telah rusak akibat di terjang banjir.⁸⁹

Sedangkan hambatan yang dirasakan Pemerintah Desa Purorejo dalam melakukan mitigasi bencana banjir adalah kurangnya peralatan dan bantuan alat berat yang digunakan untuk melakukan mitigasi bencana banjir. Keseluruhan pada proses mitigasi bencana banjir ini menggunakan peralatan yang sederhana. Tidak adanya bantuan peralatan berat yang masuk ke desa dikarenakan akses jalan menuju desa memerlukan waktu yang lama dan ekstrim untuk dilalui kendaraan perlatan berat.⁹⁰

⁸⁹Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

⁹⁰Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

b. Prioritas dan Hambatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Tegalrejo

Tindakan yang menjadi arus utama atau prioritas dalam mitigasi bencana banjir yang terjadi pada Desa Tegalrejo saat terdampak bencana banjir adalah mempersiapkan evakuasi.⁹¹ Sedangkan hambatan yang dapat ditemukan dalam proses mitigasi bencana banjir Pemerintah Desa Tegalrejo adalah Pemerintah Desa Tegalrejo tidak dapat berbuat banyak atas kerugian yang dialami oleh para petani, pekebun, dan nelayan. Petani yang memiliki lahan pada tanah jogelo tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak manapun karena tanah jogelo diluar dari wilayah Desa Tegalrejo. Nelayan yang memilih menjadi nelayan andon berkali-kali harus memperbaiki Jembatan Seseq secara swadaya karena untuk membangun jembatan memerlukan dana yang besar.⁹²

4. Keterlibatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir

a. Keterlibatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Purorejo

Dalam politik mitigasi banjir mengulas tindakan yang dilakukan pemerintah yang berwenang dan bagaimana menggunakan kewenangannya dalam studi fenomena bencana banjir. Melihat keterlibatan pihak-pihak dan bentuk keterlibatannya dalam proses mitigasi menjadi dimensi dalam politik mitigasi. Sepertihalnya tindakan mitigasi yang dilakukan Pemerintah Desa Purorejo yang memiliki

⁹¹Bapak Nyono – Kepala Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.20 WIB.

⁹²Bapak Sugiyono – Bagian Perencanaan Pemerintah Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 10.24 WIB.

wewenang terhadap wilayahnya yang terdampak bencana banjir. Dalam proses mitigasi bencana banjir yang dilakukan tidak terlepas dengan adanya pihak-pihak diluar pemerintah desa yang ikut serta terlibat dalam proses berjalannya mitigasi bencana banjir.

Berbicara keterlibatan maka yang terlibat saat mitigasi bencana banjir dilakukan meliputi Pemerintah Desa Purorejo, masyarakat Desa Purorejo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang, BPBD Lumajang, Dinas Kesehatan Lumajang, Koramil dan Kepolisian, KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa).

1) Pemerintah Desa Purorejo

Keterlibatan Pemerintah Desa menjadi suatu hal yang amat sangat berpengaruh kepada proses berlangsungnya mitigasi bencana banjir. Berbagai bentuk keterlibatan Pemerintah Desa Purorejo dapat menentukan arah mitigasi bencana banjir yang dilakukan. Dikatakan seperti ini karena pemerintah desalah yang menegetahui persis bagaimana fenomena bencana banjir terjadi pada wilayahnya. Bentuk keterlibatan tertuang dalam tindakan yang dilakukan dalam menyikapi fenomena bencana banjir yang melanda desa.

Pemerintah Desa Purorejo melakukan berbagai tindakan meliputi pelaporan kejadian terhadap Pemerintah kabupaten Lumajang dan melakukan pendataan masyarakat yang terdampak bencana banjir yang

dipergunakan untuk pemberian bantuan tepat sasaran, pengkoordinasian lapangan bersama elemen-elemen yang terlibat dalam mitigasi bencana banjir, melakukan penyisiran lapangan dan pemantauan terhadap debit air Sungai Gelidik dalam rangka berjaga-jaga jika terdapat banjir susulan, melakukan tindakan evakuasi meliputi masyarakat dan harta benda masyarakat terdampak banjir, memberikan bantuan berupa sembako terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir berupa beras, minyak, gula, dan mie instan, melakukan pembersihan akses jalan karena terdapat banyak sekali material pasir yang dibawa saat banjir terjadi, serta membuat dan membangun bronjong pada titik Tanggul Buto Terong yang rusak agar memperkokoh tanggul dari terjangan banjir.⁹³

2) Masyarakat Desa Purorejo

Keterlibatan masyarakat dalam proses mitigasi yang berlangsung membantu mempercepat penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan karena adanya bencana banjir. Masyarakat Desa Purorejo tepatnya pada Dusun Pasirejo bergotongroyong melakukan berbagai tindakan dalam proses mitigasi bencana banjir.⁹⁴ Masyarakat yang proaktif dalam keikutsertaannya pada proses mitigasi bencana banjir menjadi fenomena yang patut mendapat sorotan.

⁹³Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

⁹⁴Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

Masyarakat desa ikut serta dalam melakukan evakuasi harta benda atau barang berharga masyarakat terdampak bencana banjir yang masuk pada wilayah pemukiman penduduk, masyarakat desa terlibat aktif dengan bergotong-royong membersihkan akses jalan yang tertutup material pasir yang ikut terbawa air saat banjir terjadi, masyarakat desa ikut serta dalam pemasangan bronjong berupa kawat baja berisi batu yang dipasang pada titik tanggul yang rusak.⁹⁵ Keikutsertaan masyarakat dalam proses mitigasi bencana banjir tidak terlepas dari dampak yang dirasakan masyarakat akibat bencana banjir.

3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Mengingat bencana banjir yang masuk pada wilayah pemukiman penduduk dikarenakan oleh tanggul yang rusak maka peremajaan tanggul sangat penting bagi masyarakat Desa Purorejo. Fenomena bencana banjir yang melanda Desa Purorejo mendapat tanggapan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan terjun kelapangan dalam rangka pengecekan kondisi tanggul yang mengalami kerusakan akibat terjangan bencana banjir.⁹⁶ Tindakan observasi tanggul ini dilakukan untuk persiapan peremajaan tanggul. Peremajaan tanggul yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sebuah aspek penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman terhadap ancaman bencana banjir.

⁹⁵Bapak Musik – Masyarakat Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 11.03 WIB.

⁹⁶Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

4) Pemerintah Kabupaten Lumajang

Melihat fenomena bencana banjir yang terjadi pada wilayah Kabupaten Lumajang maka fenomena bencana banjir ini mendapatkan respon cepat dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan keterlibatannya dalam proses mitigasi bencana banjir yang berlangsung di Desa Purorejo. Respon cepat ini tidak terlepas dari kondisi yang mengkhawatirkan, dapat digambarkan dengan kondisi dimana air Sungai Gelidik telah memasuki wilayah pemukiman Desa Purorejo.

Dalam langkah cepatnya terdapat berbagai keterlibatannya dalam proses mitigasi bencana banjir pada Desa Purorejo seperti melakukan terjun lapangan dalam rangka mengetahui dengan detail peristiwa atau fenomena bencana banjir yang mengakibatkan kegelisahan bagi masyarakat desa dan Pemerintah Kabupaten Lumajang menerjunkan BPBD Lumajang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana untuk ikut serta terlibat dalam melakukan mitigasi bencana banjir pada Desa Purorejo.⁹⁷

Fenomena keterlibatan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 14 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BAB III Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 Ayat 3 menyatakan bahwa “kepala badan BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.” Dan diperkuat kembali dengan Peraturan Bupati

⁹⁷*Ibid.*,

Lumajang No. 71 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 2019-2023.”⁹⁸

5) BPBD Lumajang

Merespon persoalan bencana banjir yang terjadi pada wilayah Kabupaten Lumajang tepatnya pada Desa Purorejo maka BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Lumajang ikut serta terlibat dalam proses mitigasi bencana banjir. Keterlibatan BPBD Lumajang tidak terlepas dari wewenang dan tanggungjawabnya terhadap fenomena bencana banjir yang terdapat pada wilayah Kabupaten Luamjang.

Keterlibatan yang dilakukan BPBD Lumajang tertuang dalam berbagai bentuk tindakan terjun lapangan seperti ikut serta dalam pengkoordinasian lapangan, penyisiran lapangan dan pemantauan debit air, evakuasi, pembersihan akses jalan, memberikan bantuan kebencanaan berupa sembako, tenda pengungsian darurat, alas tidur, dan sabun pembersih badan. Tindakan pemberian bantuan yang

⁹⁸Peraturan Bupati Lumajang NO. 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023 Pasal 2 Ayat 1.

dilakukan ini sesuai dengan apa yang menjadi keperluan mendadak masyarakat saat bencana banjir terjadi.⁹⁹

6) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Fenomena bencana banjir membawa dampak yang beragam salah satunya adalah dalam aspek kesehatan masyarakat terdampak bencana banjir. Kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan tersendiri, karena dampak dari bencana banjir dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ikut serta terlibat dalam proses mitigasi bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo.

Bentuk keterlibatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Lumajang tertuang dalam pengecekan kesehatan masyarakat Desa Purorejo yang terdampak bencana banjir. Pengecekan kesehatan ini diutamakan bagi anak-anak karena rawan terdampak pada aspek kesehatan.¹⁰⁰ Bentuk keterlibatan Dinas Kesehatan Lumajang tidak terlepas dari pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat yang terdampak oleh bencana banjir.

⁹⁹Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

¹⁰⁰Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

7) TNI dan POLRI

Menghadapi fenomena bencana banjir yang memiliki resiko membahayakan keselamatan masyarakat tentunya perlu peran dan keikutsertaan TNI dan POLRI dimana keduanya merupakan sebuah institusi pemerintah yang memiliki komitmen dalam melindungi, memepertahankan, dan mengayomi masyarakat. Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (POLRI) merupakan bagian dari unit satuan dari TNI dan POLRI yang memiliki tugas membimbing, membina, dan mendukung percepatan pembangunan desa.¹⁰¹

Sepertihalnya pada saat bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo keterlibatan keduanya baik Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mitigasi bencana banjir tidak terlepas karena instruksi UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat 2 berisikan bahwa salah satu tugas pokoknya adalah “Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.”¹⁰²

Bagian lain juga tertulis dalam instruksi UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat 1 yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokoknya adalah “Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup

¹⁰¹Eko Prasetyo Karyono, Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Vol. 17 No. 1 Januari 2019, hal 12.

¹⁰²Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia BAB IV Pasal 7 Ayat 2.

dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”¹⁰³

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Purorejo keduanya berkolaborasi dalam proses berlangsungnya mitigasi bencana banjir. Beragam bentuk keterlibatan keduanya meliputi ikut serta dalam pengkoordinasi lapangan, evakuasi, dan pembersihan akses jalan.¹⁰⁴ Dari beragam keterlibatan, pada intinya sebagai bentuk manifestasi pengutamakan dalam membantu masyarakat terdampak bencana banjir.

8) Relawan KSB dan SKD

Menanggapi seputar fenomena bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo hadirnya para relawan juga tidak kalah penting dalam mitigasi bencana banjir. Relawan yang tergabung dalam KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa) ikut serta terlibat dalam proses mitigasi bencana banjir. Relawan ini adalah bentukan dari luar dan dalam desa yang secara sukarelawan terlibat dalam mitigasi yang dilakukan. Untuk menjadi relawan memerlukan jiwa sosial yang tinggi karena membantu tanpa mengharapkan sebuah imbalan.

¹⁰³Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB III Pasal 14 Ayat 1.

¹⁰⁴Bapak Nanang Wahyudi – Kepala Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.11 WIB.

keterlibatan relawan KSB dan SKD ini tertuang kedalam berbagai tindakan seperti halnya ikut serta dalam pengkoordinasian lapangan, penyisiran dan pemantauan debit air, dan evakuasi meliputi masyarakat terdampak bencana banjir dan harta benda masyarakat terdampak bencana banjir.¹⁰⁵ Keterlibatan relawan gabungan dari KSB dan SKD bertindak sesuai dengan porsinya yakni memberikan bantuan berupa tenaga dalam pengentasan permasalahan bencana banjir pada Desa Purorejo.

b. Keterlibatan dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Tegalrejo

Mitigasi bencana banjir membutuhkan banyak pihak dalam proses mitigasi yang sedang berlangsung. Pihak yang ikut serta dalam melakukan mitigasi dapat dimaknai dalam bentuk keterlibatan. Keterlibatan dalam mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh beberapa pihak sangat membantu percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana banjir.

Pihak yang terlibat dalam proses mitigasi bencana banjir pada Desa Tegalrejo adalah Pemerintah Desa Tegalrejo dan Masyarakat Desa Tegalrejo. Bentuk atau peran yang dilakukan keduanya tentunya berbeda. Pemerintah desa sebagai pemerintah di tingkat desa tentu memiliki wewenang terhadap pengambilan langkah dan tindakan dalam melakukan mitigasi bencana banjir yang terjadi di desa. Masyarakat

¹⁰⁵Bapak Imam Muzani – Sekertaris Desa Purorejo. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

desa yang proaktif terhadap fenomena bencana banjir yang terjadi pada wilayahnya membantu proses percepatan penyelesaian permasalahan yang timbul akibat fenomena bencana banjir.

1) Pemerintah Desa Tegalrejo

Keterlibatan Pemerintah Desa Tegalrejo terhadap proses mitigasi bencana banjir diuraikan dalam beberapa bentuk keterlibatan. Bentuk keterlibatan Pemerintah Desa Tegalrejo dalam mitigasi bencana banjir adalah melakukan sosialisasi dan simulasi bencana, melakukan pemantauan berkala terhadap debit air Sungai Gelidik yang terus meningkat saat bencana banjir berlangsung, mempersiapkan evakuasi masyarakat desa dalam upaya meminimalisir dampak yang disebabkan oleh fenomena bencana banjir, dan melakukan permohonan rehabilitasi Tanggul Tegalrejo kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang karena terkikis oleh kuatnya terjangan arus banjir.¹⁰⁶

2) Masyarakat Desa Tegalrejo

Keterlibatan Masyarakat Desa Tegalrejo terhadap mitigasi bencana banjir merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap fenomena bencana banjir. Bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam proses mitigasi bencana banjir sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian masalah yang diakibatkan oleh bencana banjir. Diawali dengan bekal yang didapat masyarakat atas sosialisasi dan simulasi

¹⁰⁶Bapak Nyono – Kepala Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.20 WIB.

bencana membuat masyarakat sadar akan bahaya bencana yang mengintai desa.

Masyarakat secara swadaya dan bergotong royong membangun Jembatan Seseq yakni jembatan yang terbuat dari kayu dan bambu.¹⁰⁷ Jembatan Seseq ini adalah jembatan sederhana dan tradisional yang menjadi jalan penghubung antara wilayah Desa Tegalrejo Kabupaten Lumajang dan wilayah Desa Lebakharjo Malang. Terutama bagi para nelayan andon, Jembatan Seseq ini menjadi akses terdekat menuju lokasi pantai yang berada pada wilayah Lebakharjo Malang.

C. Agensi dan Struktur dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir

Dalam mitigasi bencana banjir memerlukan banyak kontribusi dari berbagai pihak dalam prosesnya. Pemerintah sebagai struktur dan masyarakat sebagai agensi keduanya saling berkontribusi dalam mitigasi bencana banjir. Tindakan yang menunjukkan sikap pro aktif sangat membantu dalam proses mitigasi. Pemerintah dan masyarakat keduanya memiliki pengaruh pada proses mitigasi bencana banjir.

Pemerintah berperan dan bertindak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang dan peraturan keduanya menjadi landasan hukum dalam keikutsertaannya pada proses mitigasi yang sedang berlangsung. Tidak berhenti sampai disini masyarakat memiliki peran yang besar dalam percepatan mitigasi bencana banjir.

¹⁰⁷Bapak Nugroho – Masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 08.45 WIB.

Keterlibatan masyarakat sebagai wujud dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sesama makhluk sosial. Masyarakat yang terlibat merasa terpanggil karena bencana terjadi pada wilayahnya. Dengan terdampak bencana secara langsung maka tidak heran masyarakat bersikap pro aktif terhadap proses mitigasi bencana banjir di desa.

Pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dan saling berkontribusi dalam mitigasi bencana banjir karena menemukan titik tujuan yang sama. Dimana mitigasi bencana banjir sendiri tentunya bertujuan untuk percepatan pemulihan akibat bencana banjir yang terjadi di desa. Pada intinya terdapat dualitas struktur diantara keduanya baik pemerintah sebagai struktur dan masyarakat sebagai agensi keduanya saling memberikan pengaruh terhadap mitigasi bencana banjir pada desa.

1. Dinamika Struktur dan Agensi dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Purorejo

a. Pelaporan kejadian dan Pendataan

Pelaporan kejadian terkait fenomena bencana banjir sebagai wujud tindakan yang dilakukan pemerintah desa secara administratif dalam menyikapi fenomena bencana banjir yang terjadi. Pelaporan kejadian terkait fenomena bencana banjir ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan bantuan dalam proses penanganan mitigasi bencana banjir.

Pendataan masyarakat yang terdampak bencana banjir digunakan sebagai data agar dapat melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh fenomena bencana banjir dan jumlah masyarakat yang terdampak oleh adanya fenomena bencana banjir yang terjadi pada Desa Purorejo. Pendataan ini menjadi langkah yang diupayakan untuk memastikan bahwa bantuan yang datang diterima tepat sasaran. Dalam memberikan bantuan tepat sasaran memerlukan data yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pelaporan dan pendataan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian serius dalam bentuk bantuan pada proses mitigasi bencana banjir dan mendapatkan data terkait fenomena bencana banjir yang terjadi di Desa Purorejo. Pelaporan dan pendataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purorejo sebagai struktur memungkinkan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwa adanya pelaporan dan pendataan ini adalah langkah yang diupayakan agar segera mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana banjir dan ketika adanya bantuan maka dapat diterima tepat sasaran. Namun disisi lain struktur juga menghambat agensi dimana dengan adanya data ini maka tidak semuanya masyarakat dapat menerima bantuan yang diberikan terkhusus hanya bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir saja.

b. Pengkoordinasian Lapangan

Pengkoordinasian lapangan dilakukan dalam rangka menemukan langkah-langkah yang tepat sebelum mitigasi bencana banjir dilakukan. Pengkoordinasian menjadi suatu hal yang berarti karena dengan melakukan pengkoordinasian maka langkah atau tindakan yang diambil saat terjun di lapangan telah menemukan kesamaan tujuan dalam melakukan mitigasi bencana banjir. Ketika berhadapan langsung dengan fenomena bencana banjir dan tidak dibekali dengan koordinasi matang maka mitigasi bencana banjir yang dilakukan akan sulit menemukan titik kesamaan langkah dan upaya dalam tindakan.

Pengkoordinasian lapangan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, relawan gabungan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa) dengan tujuan menemukan kesamaan dalam bertindak saat melakukan mitigasi bencana banjir. Pengkoordinasian lapangan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, relawan gabungan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa) sebagai struktur memungkinkan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwa berjalannya mitigasi bencana banjir sedikit menemukan kesalahan karena telah menemukan titik kesamaan dalam tindakan yang diambil. Tetapi di lain sisi struktur juga menghambat agensi karena koordinasi yang

dilakukan ini terkhusus untuk pembahasan mitigasi bencana banjir terhadap masyarakat terdampak tidak dengan diluar itu.

c. Penyisiran Lapangan dan Pemantauan Debit Air

Adanya tindakan Penyisiran lapangan dan pemantauan debit air Sungai Gelidik karena ditakutkan air Sungai Gelidik terus meningkat. Meningkatnya debit air Sungai Gelidik ini tidak terlepas dari intensitas curah hujan yang tinggi. Hujan yang terus mengguyur wilayah Desa Purorejo memungkinkan adanya potensi banjir susulan dan dapat memperparah situasi dan kondisi Desa saat banjir terjadi. Penyisiran dan pemantauan ini dapat menjadi sarana informasi yang cepat terkait keadaan terkini debit air Sungai Gelidik dan bencana banjir yang merendam desa.

Penyisiran lapangan dan pemantauan debit air Sungai Gelidik ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, relawan gabungan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa). Tindakan yang diambil ini menunjukkan Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, relawan gabungan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa) sebagai struktur memungkinkan Masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan penyisiran dan pemantauan debit air sungai geidik sebagai upaya yang dilakukan dalam mendapatkan informasi dengan cepat terkait fenomena bencana banjir yang terjadi.

Tetapi di lain sisi struktur juga menghambat agensi karena tindakan penyisiran dan pemantauan yang dilakukan hanya untuk kebutuhan informasi terkait bencana banjir yang dibutuhkan oleh masyarakat desa terdampak sebagai agensi tidak untuk tindakan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi.

d. Evakuasi

Mengingat dampak yang ditimbulkan karena fenomena bencana banjir sangat beragam dan merugikan maka evakuasi perlu dilakukan. Evakuasi merupakan tindakan penyelamatan yang dilakukan untuk meminimalisir sebuah resiko bencana. Evakuasi penting diperhatikan dalam mitigasi bencana banjir, dengan melakukan evakuasi secara tepat dan cepat maka dapat meminimalisir dampak kerugian mulai dari harta benda sampai dengan korban jiwa. Tindakan evakuasi yang dilakukan kepada masyarakat Desa Purorejo meliputi evakuasi masyarakat terdampak dan harta benda berharga masyarakat.

Evakuasi ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, TNI, POLRI, relawan gabungan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa). Dari sini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, TNI, POLRI, relawan gabungan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan SKD (Satgas Keamanan Desa) sebagai struktur memungkinkan

masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwa dampak dari bencana banjir yang terjadi di desa dapat diminimalisir dengan melakukan evakuasi. Tetapi di lain sisi struktur juga menghambat agensi dimana evakuasi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan barang-barang berharga tidak keseluruhan barang dapat diselamatkan saat evakuasi dilakukan hal ini dikarenakan oleh banjir yang terjadi secara cepat.

e. Pembersihan Akses Jalan

Pentingnya pembersihan akses jalan ini untuk mempermudah menuju lokasi. Ketika akses jalan menuju lokasi mudah dijangkau samahalnya mempercepat proses mitigasi bencana banjir yang dilakukan. Bantuan yang dikirimkan juga dapat mudah sampai pada lokasi tujuan dimana tempat bencana banjir terjadi.

Pihak yang terlibat pada pembersihan akses jalan meliputi Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, TNI, dan POLRI keseluruhan ikut serta dalam tindakan pembersihan akses jalan agar lokasi bencana mudah diakses dan mendapatkan bantuan secara cepat. Keterlibatan Pemerintah Desa Purorejo, BPBD Lumajang, TNI, dan POLRI sebagai struktur memungkinkan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwa akses jalan menuju lokasi dapat dengan mudah dijangkau sehingga pada prosesnya, mitigasi bencana banjir dapat cepat mendapat respon dan

bantuan. Tetapi di sisi lain struktur juga menghambat agensi karena pembersihan akses jalan ini hanya diperuntukan pada titik-titik akses jalan yang tertutup material pasir bukan akses jalan secara keseluruhan yang terdapat pada desa. Sehingga pada tujuannya adalah untuk masyarakat atau agensi yang terdampak bencana bukan untuk masyarakat atau agensi secara keseluruhan.

f. Bantuan Kebencanaan

Dalam kondisi terdampak bencana banjir tentunya masyarakat sangat membutuhkan adanya bantuan. Bantuan ini dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama terutama bagi pihak yang membutuhkan seperti halnya masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. Bantuan untuk keperluan mendadak saat bencana beragam bentuknya, mulai dari bantuan kebutuhan makanan hingga bantuan pengungsian sementara sampai banjir selesai. Bantuan pengungsian sementara adalah keperluan tidur, keperluan mandi dan pakaian sehari-hari. Bantuan dikatakan penting karena dengan bantuan masyarakat terdampak bencana merasa diringankan dan dipedulikan. Fenomena seperti bencana banjir dapat dikatakan sebagai musibah buruk bagi masyarakat dan dengan adanya bantuan kebencanaan maka akan sangat membantu.

Pemberian bantuan keperluan mendadak bencana ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo dan BPBD Lumajang dalam berbagi

bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Desa Purorejo memberi bantuan berupa sembako yang digunakan sebagai kebutuhan makanan sementara saat bencana banjir. Sedangkan BPBD Lumajang memberikan bantuan berupa sembako sebagai keperluan makanan, bantuan berupa keperluan tidur, dan mandi seperti peralatan tidur dan peralatan mandi.

Disini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purorejo dan BPBD Lumajang sebagai struktur memampukan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwasanya agensi mendapat perhatian dan kepedulian dengan menerima bantuan keperluan mendadak saat bencana. Tetapi di lain sisi struktur menghambat agensi dimana yang mendapatkan bantuan keperluan mendadak bencana hanya agensi yang terdampak bencana tidak dengan masyarakat atau agensi secara keseluruhan.

g. Pemasangan Bronjong

Bronjong adalah kawat baja berisikan bebatuan yang digunakan sebagai penahan air sungai agar supaya tidak masuk pada wilayah desa. Bronjong ini dipasang sepanjang tanggul yang telah rusak atau memerlukan perbaikan. Pemasangan bronjong ini sebagai tindakan yang dilakukan dalam merespon rusaknya Tanggul Buto Terong. Memang bronjong ini tidak bisa lebih kuat seperti tanggul yang utuh

namun setidaknya pemasangan bronjong ini dilakukan agar ketika terjadi luapan debit air Sungai Gelidik maka tidak akan terjadi banjir lagi.

Pemasangan bronjong ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Purorejo sebagai bentuk meminimalisir bencana banjir. Dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa Purorejo sebagai struktur memampukan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwa banjir tidak terjadi lagi karena tanggul telah dipasang oleh bronjong yang dapat menghalau debit air sungai. Tetapi pada sisi lain struktur juga menghambat agensi karena pemasangan bronjong ini hanya pada titik tanggul yang rusak seperti pada Tanggul Buto Terong yang berdekatan pada salah satu dusun di Desa Purorejo yakni Dusun Pasirejo tetapi tidak ada pemasangan bronjong pada Tanggul Buto Terong yang membatasi dusun lainnya. Artinya ancaman bencana banjir masih beresiko terdampak pada masyarakat sebagai agensi di dusun lainnya.

h. Persiapan Peremajaan Tanggul

Tanggul yang berada pada Desa Purorejo dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan Tanggul Buto Terong. Tanggul ini merupakan pembatas antara wilayah sungai dan wilayah desa. keberadaan tanggul penting bagi masyarakat desa karena dengan tanggulah masyarakat desa terhindar dari ancaman bencana banjir.

Namun apabila tanggul dalam keadaan yang memperihatinkan maka ancaman atau resiko terjadi banjir benar adanya. Masyarakat desa sangat mengandalkan tanggul sebagai media agar dapat terhindar dari dampak yang dapat terjadi akibat bencana banjir. Tanggul yang rusak perlu mendapat perhatian khusus karena tanggul inilah yang menghalau air sungai menuju wilayah pemukiman penduduk. Persiapan peremajaan tanggul ini tidak terlepas dengan adanya kerusakan yang terjadi pada tanggul hal ini mengakibatkan air sungai memasuki wilayah Desa Purorejo.

Persiapan peremajaan tanggul dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindakan dalam mengedepankan keselamatan masyarakat. Disini dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai struktur memungkinkan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan keselamatan agensi dari bencana banjir dan tentunya dapat meminimalisir resiko banjir susulan karena adanya persiapan peremajaan tanggul. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi karena persiapan ini masih pada tahap perencanaan dan tidak diketahui kapan akan dilaksanakan peremajaannya.

i. Penerjunan BPBD

Bencana banjir memerlukan adanya keterlibatan berbagai pihak seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terutama

BPBD Lumajang karena bencana banjir ini terjadi pada wilayah Lumajang. BPBD menjadi wadah yang dikhususkan untuk berhadapan dengan permasalahan seputar fenomena bencana.

Penerjunan BPBD Lumajang ini tidak terlepas dari instruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang dan tugas BPBD sendiri dalam isu kebencanaan. Disini dapat terlihat bahwa Pemerintah kabupaten Lumajang dan BPBD Lumajang sebagai struktur memampukan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dimana struktur memastikan keterlibatannya di tengah kegelisahan masyarakat karena terdampak bencana banjir. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi dimana penerjunan BPBD Lumajang ini diperuntukan terkhusus dalam keikutsertaannya pada proses mitigasi bencana banjir dan membantu agensi yang terdampak banjir tidak diterjunkan dalam rangka alasan lain yang menyangkut keseluruhan agensi atau masyarakat desa.

j. Pengecekan Kesehatan

Bencana banjir menyertakan dampak yang beragam salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian khusus. kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus terutama kepada masyarakat yang terdampak saat bencana banjir terjadi. Keselamatan masyarakat desa menjadi faktor utama pada aspek kesehatan yang sangat penting.

Pengecekan kesehatan ini dilakukan dalam rangka memastikan keselamatan masyarakat terutama pada bidang kesehatan.

Tindakan pengecekan kesehatan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lumajang dimana sesuai dengan porsinya dalam keikutsertaannya melakukan mitigasi bencana banjir. Disini dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Lumajang sebagai struktur memampukan masyarakat sebagai agensi dimana struktur melakukan tindakan pengecekan kesehatan yang difokuskan dalam usaha menyelamatkan agensi dari dampak buruk kesehatan yang bisa saja terjadi terhadap agensi sebagai pihak yang terdampak bencana banjir. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi dimana dalam pengecekan kesehatan ini diutamakan dilakukan terhadap anak-anak yang terdampak bencana banjir. Diluar ini juga pengecekan kesehatan dilakukan terhadap agensi yang terdampak bencana banjir tidak dengan agensi keseluruhan didalam masyarakat desa.

k. Proaktif Kebencanaan

Dalam menanggapi fenomena bencana banjir dengan dualitas struktur dalam strukturasi *Anthony Giddens* maka tidak hanya fokus kepada satu sisi struktur saja tetapi melihat juga dari sisi agensinya karena keduanya mendapat perhatian dalam dualitas struktur yang mejadi praktik sosial sepertihalnya ikut serta dalam melakukan

mitigasi bencana banjir di Desa Purorejo. Agensi atau masyarakat Desa Purorejo yang bersikap proaktif terhadap permasalahan bencana banjir akan sangat membantu terhadap proses mitigasi bencana banjir itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi memberi pengaruh terhadap proses mitigasi bencana banjir. Pengaruh yang diberikan agensi ini adalah ikut serta dalam evakuasi, pembersihan akses jalan, dan bersama-sama melakukan gotong royong membantu pada proses pemasangan bronjong pada Tanggul Buto Terong yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.

Pengaruh yang diberikan masyarakat Desa Purorejo sebagai agensi dapat membantu mempercepat pada proses mitigasi bencana banjir yang dilakukan. Terlebih pengaruh yang diberikan agensi juga dapat mempengaruhi struktur terutama Pemerintah Desa Purorejo karena tentunya dengan memiliki masyarakat yang proaktif terhadap permasalahan bencana banjir yang terjadi di desa akan menguntungkan dan meringankan struktur dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir yang terjadi di desa.

2. Dinamika Struktur dan Agensi dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Desa Tegalrejo

a. Sosialisasi dan Simulasi Bencana

Sosialisasi dan simulasi bencana sangat penting dalam agenda mitigasi bencana banjir. Kegiatan sosialisasi dan simulasi memiliki maksud dan tujuan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebencanaan. Terlebih kegiatan ini dapat menjadikan masyarakat yang sadar terhadap ancaman bencana seperti bencana banjir. Simulasi yang dilakukan tidak kalah penting karena secara praktik masyarakat telah melakukan bagaimana mengevakuasidiri secara mandiri. Sosialisasi dan simulasi bencana sangat cocok dilakukan kepada wilayah yang memiliki resiko kebencanaan seperti halnya pada Desa Tegalrejo yang memiliki resiko bencana tsunami, gempa, dan banjir.

Kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana ini tidak terlepas dari agenda Pemerintah Desa Tegalrejo. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai struktur memungkinkan masyarakat sebagai agensi dimana struktur memastikan bahwa agensi telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi permasalahan bencana. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi karena kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana hanya dilakukan 1 (satu)

kali yang artinya tidak semua agensi atau masyarakat terlibat saat kegiatan dilaksanakan.

b. Permohonan Rehabilitasi Tanggul

Fenomena bencana banjir pada Desa Tegalrejo tidak sampai masuk pada wilayah pemukiman tetapi berdampak pada lahan pertanian masyarakat desa seluas kurang lebih 5 (lima) hektar. Bencana banjir ini juga mengakibatkan hilangnya dua sayap tanggul dan terkikisnya tanggul utama. Kondisi inilah yang membuat masyarakat khawatir jika terdapat banjir susulan maka tanggul tidak dapat lagi menahan derasnya air sungai dan berimbas pada pemukiman penduduk desa. Berawal dari kekhawatiran muncul sebuah upaya yang dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan rehabilitasi tanggul kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tindakan permohonan Tanggul Tegalrejo ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dengan harapan agar kekhawatiran yang timbul ditengah masyarakat cepat terselesaikan. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai struktur memungkinkan masyarakat sebagai agensi dimana upaya permohonan rehabilitasi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari ancaman bencana banjir yang mengintai Desa. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi karena permohonan rehabilitasi tanggul ini

adalah langkah yang bisa saja dapat direalisasikan tetapi menunggu waktu sampai prosedur benar-benar berjalan.

c. Pemantauan Berkala Debit Air

Sungai Gelidik menjadi aliran sungai yang memiliki hulu terhubung sampai pada Gunung Semeru. Peningkatan debit air Sungai Gelidik tidak terlepas dari intensitas curah hujan yang tinggi dan bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru. Alasan yang mendasar mengapa bencana banjir yang terjadi pada Desa Tegalrejo terjadi tidak hanya karena intensitas curah hujan tinggi tetapi juga bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru karena banyak didapati belerang yang ikut serta terbawa banjir dan aroma blerang yang sangat menyengat pada arus Sungai Gelidik.

Pemantauan debit air ini dilakukan secara berkala dengan tujuan mengetahui kondisi terkini debit air sungai dan ketika dirasa membahayakan maka akan dilakukan tindakan berikutnya yaitu mempersiapkan evakuasi. Pemantauan debit air ini dilakukan oleh Pemerintahan Desa Tegalrejo. Dapat dilihat disini bahwa Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai struktur memampukan masyarakat sebagai agensi dimana struktur melakukan tindakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat desa. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi dimana pemantauan ini dilakukan untuk persiapan evakuasi masyarakat atau agensi yang berada dikawasan

sekitar tanggul tidak dengan masyarakat atau agensi secara keseluruhan. Terlebih tindakan pemantauan ini dilakukan hanya pada satu titik tanggul tidak pada keseluruhan sepanjang tanggul.

d. Mempersiapkan Evakuasi

Memepersiapkan evakuasi merupakan tindakan penyelamatan yang dilakukan dengan tujuan meminimalisir dampak yang akan diberikan oleh adanya bencana. Evakuasi dapat meliputi evakuasi harta benda dan manusia atau masyarakat terdampak bencana. Tahap persiapan evakuasi menjadi tahap awal sebelum melakukan tindakan evakuasi. Di dalam tahap ini pemerintah terkait mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan evakuasi seperti mempersiapkan peralatan yang dapat dipergunakan dalam mengevakuasi dengan cepat.

Persiapan evakuasi ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dalam rangka mengutamakan keselamatan masyarakat agar terhindar dari dampak bencana banjir. Dari sini dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai struktur memungkinkan masyarakat desa sebagai agensi dimana struktur memastikan agensi terhindar dari dampak buruk atau kerugian baik harta benda sampai korban jiwa yang disebabkan oleh bencana banjir. Tetapi disisi lain struktur juga menghambat agensi dimana upaya persiapan evakuasi

ini dilakukan terkhusus pada agensi yang telah berumur lanjut usia atau lansia.

e. Proaktif Kebencanaan

Dalam menanggapi permasalahan bencana banjir dengan dualitas struktur dalam teori strukturasi *Anthony Giddens* maka tidak hanya melihat pada satu sisi struktur tetapi melihat juga dari sisi agensinya karena keduanya mendapat perhatian dalam dualitas struktur. Agensi atau masyarakat desa yang bersikap proaktif terhadap permasalahan bencana banjir akan sangat membantu pada proses mitigasi bencana banjir. Keterlibatan masyarakat Desa Tegalrejo sebagai agensi memberi pengaruh terhadap proses mitigasi bencana banjir. Pengaruh yang diberikan agensi ini adalah melakukan tindakan secara swadaya dalam membangun Jembatan Sesek atau jembatan yang terbuat dari bambu. Ketika bencana banjir atau ketika debit air Sungai Gelidik meningkat maka jembatan yang terbuat dari bambu ini akan ikut terseret oleh derasnya air.

Masyarakat sebagai agensi telah melakukan pembuatan Jembatan Sesek berkali-kali karena debit air Sungai Gelidik sering mengalami peningkatan. Dari sini dapat terlihat bahwa masyarakat desa sebagai agensi juga ikut serta berperan dan memberikan pengaruh terhadap mitigasi bencana banjir. Tindakan agensi ini tentunya memberi pengaruh juga terhadap Pemerintah Desa

Tegalrejo sebagai struktur karena ketika masyarakat sebagai agensi sadar dan proaktif terhadap permasalahan bencana banjir maka Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai struktur juga sangat diuntungkan.

3. Komparasi

Mengingat dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) lokasi yang berbeda yakni pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo maka perlu adanya pembahasan tentang komparasi atau melihat adanya suatu perbandingan yang ada setelah melakukan penganalisaan pada penelitian ini. Setelah melakukan analisis secara mendalam, ditemukan beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitian ini. Berikut beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitian ini meliputi :

a. Struktur

Struktur dalam proses mitigasi bencana banjir Desa Purorejo meliputi : Pemerintah Desa Purorejo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang, BPBD Lumajang, Dinas Kesehatan Lumajang, TNI, POLRI, KSB (Kelompok Siaga Bencana), SKD (Satgas Keamanan Desa). Struktur dalam proses mitigasi bencana banjir Desa Tegalrejo adalah Pemerintah Desa Tegalrejo.

b. Dualitas Struktur Mitigasi Bencana Banjir Desa Purorejo

Dualitas struktur terhadap mitigasi bencana banjir Desa Purorejo meliputi :

Pemerintah Desa Purorejo (pelaporan kejadian dan pendataan masyarakat terdampak bencana, pengkoordinasian lapangan, penyisiran lapangan dan pemantauan debit air, evakuasi, pembersihan akses jalan, bantuan kebencanaan, pemasangan bronjong), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (persiapan peremajaan tanggul), Pemerintah Kabupaten Lumajang (Penerjunan BPBD Lumajang), BPBD Lumajang (ikut serta dalam pengkoordinasian lapangan, penyisiran lapangan dan pemantauan debit air, evakuasi, pembersihan akses jalan, memberikan bantuan kebencanaan berupa sembako, tenda pengungsian darurat, alas tidur, dan sabun pembersih badan), Dinas Kesehatan Lumajang (pengecekan kesehatan), TNI dan POLRI (ikut serta dalam pengkoordinasi lapangan, evakuasi, pembersihan akses jalan), relawan KSB dan SKD ikut serta dalam pengkoordinasian lapangan, penyisiran dan pemantauan debit air, dan evakuasi).

Masyarakat Desa Purorejo (ikut serta dalam evakuasi, pembersihkan akses jalan, dan bersama-sama melakukan gotongroyong pemasangan bronjong pada Tanggul Buto Terong).

c. Dualitas Struktur Mitigasi Bencana Banjir Desa Tegalrejo

Dualitas Struktur terhadap mitigasi bencana banjir Desa Tegalrejo meliputi :

Pemerintah Desa Tegalrejo (sosialisasi dan simulasi bencana, pemantauan berkala debit air, mempersiapkan evakuasi, permohonan rehabilitasi tanggul).

Masyarakat Desa Tegalrejo (melakukan tindakan secara swadaya dalam membangun Jembatan Sesek atau jembatan yang terbuat dari bambu).

Dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa hal yang membandingkan diantara agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo adalah keterlibatan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir lebih banyak pada Desa Purorejo dibandingkan dengan Desa Tegalrejo. Tetapi ada juga hal yang membuat sama diantara agensi dan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo yaitu baik agensi dan struktur pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo keduanya sama-sama memainkan peran dalam memberikan pengaruh dan saling berkontribusi dalam proses mitigasi bencana banjir.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan dan keterlibatan pada proses mitigasi bencana banjir menunjukkan keseriusan terhadap pengantisipasi bencana banjir yang terjadi di Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo. Tindakan pemerintah desa dengan melakukan mitigasi bencana banjir menjadi bentuk komitmen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Karena mitigasi bencana banjir membutuhkan kontribusi banyak pihak dalam penyelesaiannya, maka keterlibatan menjadi aspek penting dalam proses mitigasi bencana banjir. Dengan adanya keterlibatan banyak pihak di luar pemerintah desa membawa dampak positif terhadap percepatan proses mitigasi bencana banjir yang sedang berlangsung.
2. Dengan menggunakan agensi dan struktur dalam Teori Strukturasi dari *Anthony Giddens* maka dapat dikatakan bahwa dalam proses mitigasi bencana banjir terjadi dualitas struktur atau hubungan yang saling mempengaruhi antara agensi dan struktur. Struktur pada Desa Purorejo dan struktur pada Desa Tegalrejo mempengaruhi agensi pada Desa Purorejo dan agensi pada Desa Tegalrejo dengan memungkinkan dalam bentuk beragam tindakan

dan keterlibatan struktur dalam proses mitigasi bencana banjir. Sedangkan, agensi pada Desa Purorejo dan agensi pada Desa Tegalrejo mempengaruhi struktur pada Desa Purorejo dan struktur pada Desa Tegalrejo dengan keterlibatan proaktifnya dalam proses mitigasi bencana banjir.

3. Mengingat dalam penelitian ini mencantumkan 2 (dua) lokasi berbeda maka perlu adanya studi komparasi atau melihat perbandingan diantara keduanya. Walaupun dengan fenomena bencana yang sama yaitu bencana banjir, namun terdapat perbedaan dalam segi tindakan dan keterlibatan yang dilakukan. Pemerintah Desa Purorejo memprioritaskan pemasangan bronjong sebagai bentuk tindakan dalam mitigasi bencana banjir, sedangkan Pemerintah Desa Tegalrejo memprioritaskan mempersiapkan evakuasi sebagai bentuk tindakan dalam mitigasi bencana banjir. Pihak yang terlibat dalam proses mitigasi bencana banjir Desa Purorejo meliputi Pemerintah Desa Purorejo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang, BPBD Lumajang, Dinas Kesehatan Lumajang, TNI, POLRI, KSB (Kelompok Siaga Bencana), SKD (Satgas Keamanan Desa), dan masyarakat Desa Purorejo. Sedangkan pada Desa Tegalrejo meliputi Pemerintah Desa Tegalrejo dan Masyarakat Desa Tegalrejo.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran terkait politik mitigasi pasca bencana banjir tingkat desa pada Desa Purorejo dan Desa Tegalrejo Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Dengan potensi bencana banjir yang terdapat di Desa Purorejo, perlunya Pemerintah Desa Purorejo dalam merancang dan membuat produk hukum berupa kebijakan secara tertulis di dalam Perdes (Peraturan Desa) tentang mitigasi bencana banjir yang nantinya menjadi kerangka acuan dalam mengambil sebuah tindakan saat terjadi bencana banjir di desa. Begitupun untuk Pemerintah Desa Tegalrejo, dalam hal ini Pemerintah Desa Tegalrejo perlu melakukan pembaharuan terhadap Perdes (Peraturan Desa) yang pernah dirancang dan dibuat agar menjadi kebijakan yang secara resmi sebagai produk hukum yang jelas dan tertulis di dalam Perdes (Peraturan Desa) untuk menjadi kerangka acuan dalam mengambil tindakan saat terjadi bencana banjir di desa. karena pada Perdes (Peraturan Desa) Tegalrejo Nomor 09 tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2020.¹⁰⁸ Hanya diperuntukan dalam kurun waktu 2015 – 2020 saja.

¹⁰⁸Peraturan Desa Tegalrejo No. 09 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2020.

2. Untuk menanggapi hambatan yang ada saat proses mitigasi bencana banjir pada Desa Purorejo tentang kurangnya peralatan dan bantuan alat berat yang digunakan dalam melakukan mitigasi bencana banjir, perlunya Pemerintah Desa Purorejo dalam menganggarkan peralatan yang nantinya dapat digunakan sebagai langkah mengantisipasi kurangnya peralatan dalam melakukan mitigasi bencana banjir.

Begitupun dengan hambatan yang ada saat proses mitigasi bencana banjir pada Desa Tegalrejo tentang kerugian petani, pekebun, dan nelayan. Mengingat wilayah Desa Tegalrejo luas dan tanahnya yang subur, perlunya Pemerintah Desa Tegalrejo dalam upaya yang serius seperti halnya menyiapkan sebageian lahan yang masih termasuk kedalam wilayah desa untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sehingga petani dan pekebun yang tidak memiliki lahan tidak melakukan aktivitas bertani dan berkebun pada wilayah tanah jogelo. Untuk nelayan andon yang berlayar mencari ikan di luar wilayah Desa Tegalrejo, perlunya Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap nelayan andon untuk berlayar mencari ikan pada wilayah Desa Tegalrejo saja karena desa pun memiliki Pantai Bulu yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan andon untuk mencari ikan dengan banyak sumber kekayaan laut di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M Najeri Al Syahrin, Dhena Aldhalia, M. Ramadhan Saputra, Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Banjar: Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 1 April 2022.
- Amanda Putri Amelia, Sosialisasi APE (Alat Peraga Edukatif) untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Sdn 05 Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 01 03 Month Oktober 2022.
- Andarusni Alfansyur, Mariyani, Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial, Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2 December 2020.
- Andi Tenri Sompia, Arif Rahman Hakim, Dinar Adistiyani, Deforestasi di Kabupaten Banjar dalam Perspektif Politik Lingkungan, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 2 April 2022.
- Bima Ade Prayoga Setiawan, Eka Yulyana, Lina Aryani, “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7 No.8 Desember 2021.
- Burhanudin Mukhamad Faturahman, Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik, PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 Oktober 2018.
- Daniel Nyberg, Christopher Wright, Vanessa Bowden, Organising Responses to Climate Change The Politics of Mitigation, Adaptation and Suffering, United Kingdom: Cambridge University Press 2023.
- Dinda Samego Anggraheni, Haykal Attamimi, Jumardi, Perkembangan Kerajaan Islam di Banten pada Masa Sultan Ageng Tirtayasa dalam Aspek Politik dan Sosial, PATTINGALLOANG Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan Vol. 7 No.2 Agustus 2020.
- Dr. Nursapia Harahap, M.A, Penelitian Kualitatif, Medan: Walashri Publishing, Maret 2020.
- Eko Prasetyo Karyono, Politik Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah Vol. 17 No. 1 Januari 2019.
- George Ritzer dan Douglas J Goodman, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Bantul : Kreasi wacana, 2014), hal.572

<http://purorejo-tempursari.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/41>, diakses 6 Januari 2023 pukul 21.53 WIB.

Haris Setiawan, Muhammad Jalil, Muhammad Enggi S, Fathan Purwadi, Christopel Adios S, Asri Wahyu Brata, Andi Syaful Jufda, “Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda”, Jurnal Geografi Gea, Vol. 20 No. 1 April 2020.

LPPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2018, Bab II Program Kerja Bidang Penyelenggaraan, 2.2 Kependudukan.

Miftahul Huda, “Banjir Landa Desa Purorejo Lumajang, 102 Rumah Terendam dan 315 Warga Mengungsi”, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/17/232909678/banjir-landa-desa-purorejo-lumajang-102-rumah-terendam-dan-315-warga>, diakses 6 Januari 2023 pukul 22.00 WIB.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012.

Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21 No. 1 2021.

Nur Mas’Ula, I Putu Siartha, I Putu Ananda Citra, Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Vol. 7 No. 3 November 2019.

Nurjanah, Manajemen Bencana, Bandung: Alfabeta 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab I Pasal 2.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur Bab III Pasal 4 Ayat 1.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur Bab II Pasal 2 Ayat 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang NO. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Bab III Pasal 6.

Peraturan Bupati Lumajang NO. 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023 Pasal 2 Ayat 1.

Peraturan Desa, tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2020-2026”, Bab II Profil Desa, 2.2 Kondisi Umum Desa.

Peraturan Desa Tegalorejo No. 09 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2020.

Redaksi,

<https://www.kompasiana.com/kkn67057/62e0086608a8b50586533da2/melalui-kkn-universitas-jember-di-desa-purorejo-destinasi-wisata-sumber-mata-air-umbulsari-desa-purorejo-kec-tempursari-kab-lumajang-diharapkan-hidup-kembali?page=all#section1>, diakses 6 Januari 2023 pukul 22.54 WIB.

Syamsudin, Verliani Dasmara, Triyulaeli, “Pengaruh Knowledge Management Bumdes Dan Leadership Kepala Desa Terhadap Perekonomian Desa Pasca Bencana Tsunami”, *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 2021.

Samahuddin Muharram, Fadly, Dhena Aldhaliaa, Rosa Pebriandini, Falehah Nabila, Politik Ekologi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Banjar, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 7 No. 7 April 2022*.

Slamet Subekti, Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa Bali, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3 No. 1 Desember 2019.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta), 2014.

Sularso H.S, Hengkelare, Octavianus H.A, Rogi, Suryono, Mitigasi Risiko Bencana Banjir dimanado, *Jurnal Spasial Vol. 8.No. 2 2021*.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia BAB IV Pasal 7 Ayat 2.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB III Pasal 14 Ayat 1.

Wahyu Hamdika, Alfian Miko, & Afrizal, Kesiapsiagaan Komunitas Pesisir Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami (Studi Kasus di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam), *JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember 2019*.

Wawancara Bapak Imam Muzani (Sekertaris Desa Purorejo), 14 Maret 2023 pada pukul 14.00 WIB.

Wawancara Bapak Nanang Wahyudi (Kepala Desa Purorejo), 14 Maret 2023 pada pukul 13.11 WIB.

Wawancara Bapak Nyono (Kepala Desa Tegalrejo), 13 Maret 2023 pada pukul 09.20 WIB.

Wawancara Bapak Imam Supi'i (Sekertaris Desa Tegalrejo), 13 Maret 2023 pada pukul 10.00 WIB.

- Wawancara Bapak Heri (Masyarakat Desa Purorejo), 16 Maret 2023 pada pukul 19.01 WIB.
- Wawancara Bapak Rizki Maulana (Masyarakat Desa Purorejo), 16 Maret 2023 pada pukul 18.10 WIB.
- Wawancara Bapak Sutrisno (Masyarakat Desa Tegalrejo), 15 Maret 2023 pada pukul 07.34 WIB.
- Wawancara Bapak Yohadi (Masyarakat Desa Tegalrejo dan Relawan BPBD Kec. Tempursari), 14 Maret 2023 pada pukul 10.20 WIB.
- Wawancara Bapak Nugroho (Masyarakat Desa Tegalrejo), 16 Maret 2023 pada pukul 08.45 WIB.
- Wawancara Ibu Sumaidah (Masyarakat Desa Purorejo), 16 Maret 2023 pada pukul 12.14 WIB.
- Wawancara Bapak Paimo (Masyarakat Desa Purorejo), 16 Maret 2023 pada pukul 12.25 WIB.
- Wawancara Bapak Dzaki Tsaqif (Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Desa Purorejo), 16 Maret 2023 pada pukul 20.04 WIB.
- Wawancara Bapak Musik (Masyarakat Desa Purorejo), 16 Maret 2023 pada pukul 11.03 WIB.
- Wawancara Bapak Mujiono (Masyarakat Desa Tegalrejo), 13 Maret 2023 pada pukul 13.05 WIB.
- Wawancara Ibu Ismi (Masyarakat Desa Tegalrejo), 13 Maret 2023 pada pukul 13.24 WIB.
- Wawancara Bapak Sugiyono (Bagian Perencanaan Pemerintah Desa Tegalrejo), 13 Maret 2023 pada pukul 10.24 WIB.
- Yarwin Yari, Hardin La Ramba, Fendy Yesayas, Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Kesiapsiagaan Bencana Banjir pada Mahasiswa Kesehatan di DKI Jakarta, Jurnal Kesehatan Holistic Volume 5 Nomor 2 Juli 2021.
- Zainal Abidin Achmad, Anatomy of Structuration Theory and Ideology of The Third Way of Anthony Giddens, Jurnal Translitera Vol 9 No. 2 2020.